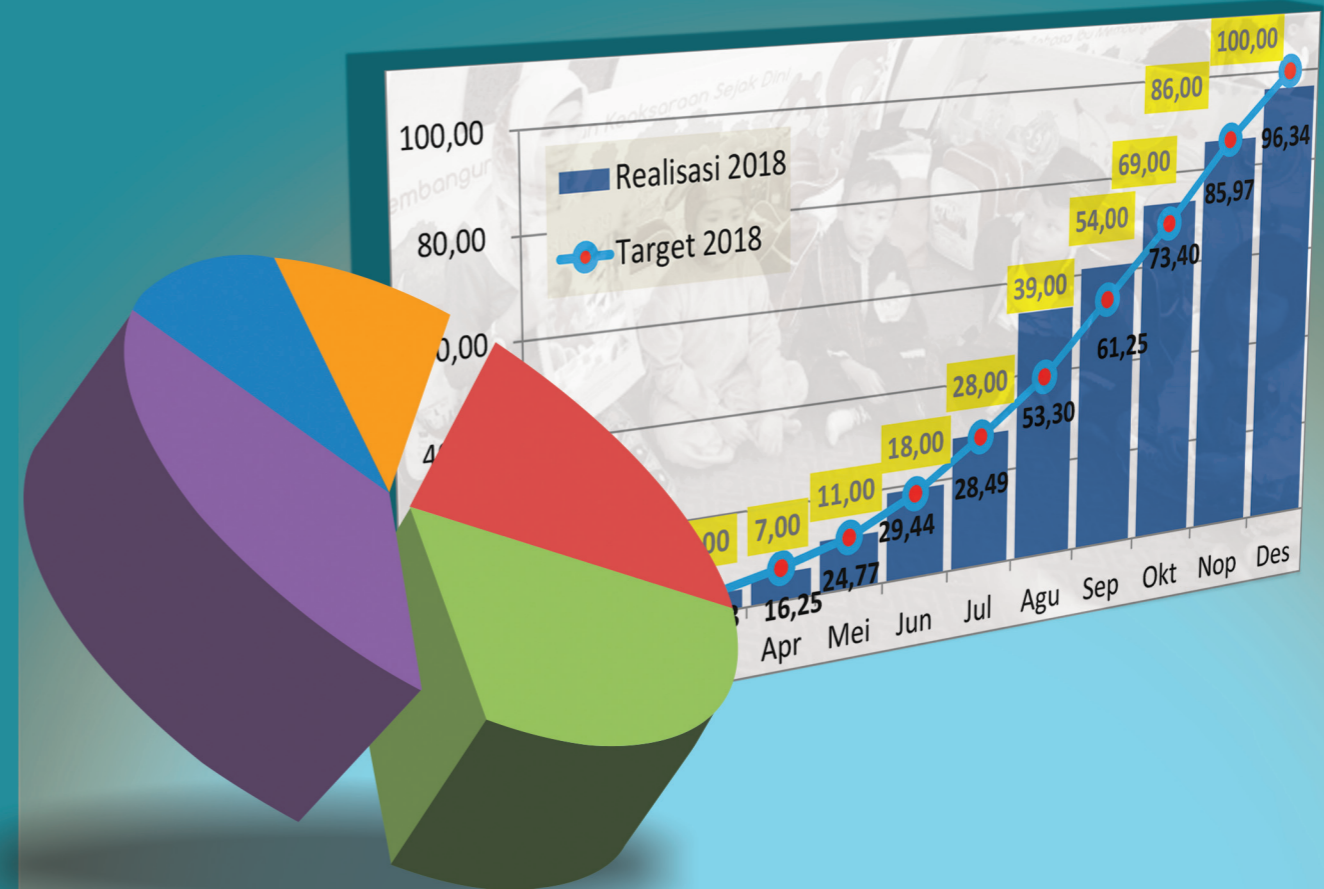




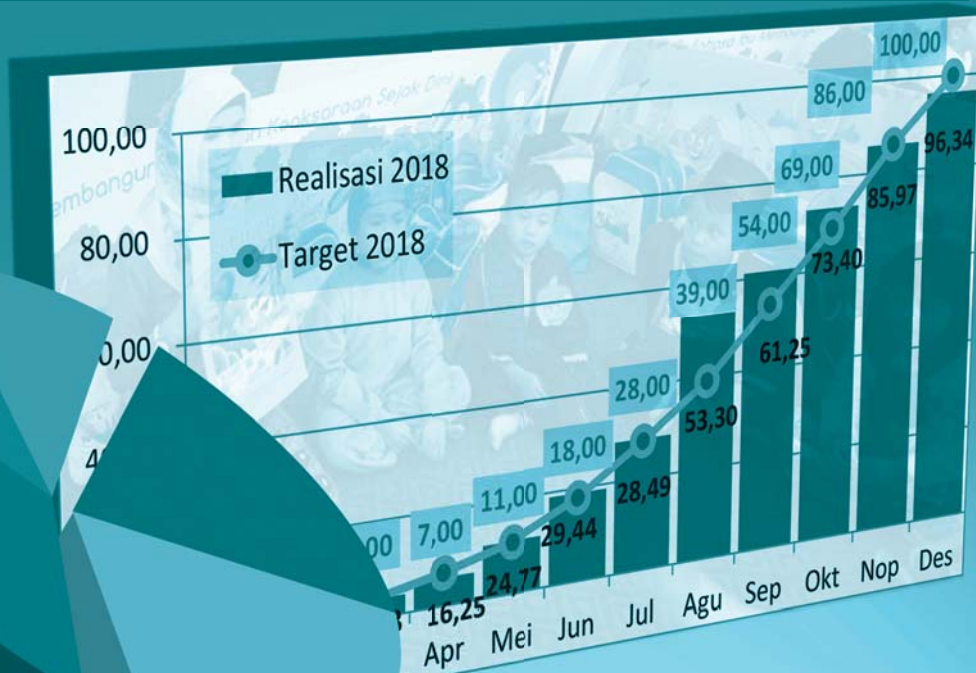
(LAKIP) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akhir Tahun DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2018





(LAKIP) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akhir Tahun

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
2018



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Tahun 2019

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan karunianya sehingga pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama tahun 2017 telah dapat kami laksanakan dengan baik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi tersebut. Untuk itu Direktorat Pembinaan PAUD melakukan penyusunan LAKIP Tahunan untuk tahun 2018.

LAKIP Direktorat Pembinaan PAUD disusun untuk memberikan gambaran dan analisis mengenai pelaksanaan program PAUD selama tahun 2018. Laporan ini memuat analisis pencapaian dan kesenjangan antara rencana kegiatan dengan realisasinya.

Laporan ini pun menjelaskan daya serap fisik dan keuangan berdasarkan indikator akuntabilitas kinerja, komponen input, output, outcome, dan dampak. Dalam melakukan analisis keuangan ditentukan capaian daya serap berdasarkan 4 (empat) jenis belanja yaitu belanja modal, belanja barang, belanja bantuan sosial, dan belanja gaji pegawai.

Hingga akhir tahun 2018, Direktorat Pembinaan PAUD telah mampu mencapai daya serap anggaran 96,34% dan realisasi daya serap fisik sekitar 100%. Capaian ini sudah relatif baik meskipun belum maksimal. Tentunya, ada keberhasilan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan program PAUD pada tahun 2018 ini. Dengan LAKIP akhir tahun ini, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dan perhatian bagi perencanaan pelaksanaan program pada tahun yang akan datang yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun selanjutnya.

Jakarta, Januari 2019

Direktur PAUD,

Dr. Muhammad Hasbi

NIP 197306231993031001

Ringkasan Eksekutif

Program Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2018 menitikberatkan kepada gerakan pendidikan yang berkualitas dan hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembangunan Berkelanjutan. Direktorat Pembinaan PAUD (Dit Bin PAUD) sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan PAUD, menuangkan program dan rencana di dalam rencana strategis (Renstra) tahun 2015 – 2019. Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, Direktorat Pembinaan PAUD berkewajiban untuk melaporkan kinerja yang tertuang pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan tersebut merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi, serta merupakan media akuntabilitas setiap kementerian/ lembaga (K/L), termasuk pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan PAUD.

Kinerja Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2018 tertuang dalam tiga (3) IKP dan sebelas (10) IKK. Kedua jenis Indikator kinerja tersebut, setiap tahunnya dirinci dalam target-target yang tertuang di dalam rencana strategis (Renstra) tahun 2016 – 2019. Secara umum pembangunan PAUD di Indonesia dalam satu tahun anggaran mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari peningkatan kualitas kelembagaan di mana pada tahun 2017 dari 200.389 lembaga PAUD menjadi 203.938 pada akhir tahun 2018 (sumber: DapoPAUD-Dikmas).

Pencapaian kinerja Dit Bin PAUD antara lain juga tergambar dalam pencapaian daya serap anggaran

yang pada tahun 2018 mencapai 96,34% dari total anggaran pusat Rp217.471.844.000,- (dua ratus tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah). Pencapaian kinerja daya serap anggaran yang tertinggi bersumber dari Subdit program dan evaluasi dengan total pencapaian daya serap 99,56%, tetapi pada tahun 2018 pencapaian kinerja anggaran dari masing-masing subdit merata semua mencapai di atas 90%.

Selain pencapaian daya serap anggaran yang tinggi, kinerja Dit Bin PAUD juga dapat dilihat dari pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercantum dalam perjanjian kinerja. Ukuran kinerja Dit Bin PAUD dinilai dari pencapaian layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, yang diuraikan dalam tiga Indikator Kinerja Program (IKP) dan sepuluh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Capaian indikator kinerja di atas diuraikan sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Program (IKP)

1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3 – 6 tahun terealisasi 75,13% dari target 75,10% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,03%.
2. Jumlah lembaga PAUD memenuhi standar nasional teralisasi 12.209 lembaga dari target 12.209 lembaga dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.
3. Persentase (%) kab./kota memiliki lembaga PAUD Pembina yang menyelenggarakan holistik integratif terealisasi 80,10% dari target 50% dengan persentase capaian kinerja sebesar 160%.

B. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah lembaga PAUD memperoleh bantuan rehabilitasi gedung, terealisasi 215 lembaga dari target 215 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.
2. Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran termasuk APE, terealisasi 90 lembaga dari target 90 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.
3. Jumlah ruang kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir, terealisasi 128 lembaga dari target 128 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.
4. Jumlah anak memperoleh BOP PAUD untuk usia 3 – 6 tahun, terealisasi 5.500 anak dari target 5.500 anak, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.
5. Persentase lembaga PAUD pembina menyelenggarakan PAUD holistik integratif, terealisasi 660 lembaga dari target 660 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.
6. Jumlah lembaga yang melaksanakan kurikulum 2013 PAUD, terealisasi 5.869 lembaga dari target 5.869 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.
7. Kabupaten/kota yang menyelenggarakan penuntasan PAUD minimal 1 tahun pra SD, terealisasi 40 kab./kota dari target 40 kab./kota, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.
8. Jumlah dokumen penyelenggaraan HAN, lomba, dan apresiasi, terealisasi 34 lembaga dari target 34 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.
9. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan gugus PAUD, terealisasi 6.100 lembaga dari target 6.100 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.
10. Jumlah dokumen Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD, terealisasi 29 dokumen dari target 29 dokumen, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

C. Prestasi lainnya

Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2018 memiliki beberapa agenda yang besar dan menjadikan suatu keberhasilan, salah satunya adalah pada acara Dialog Kebijakan Dialog Kebijakan PAUD dan Pendidikan Keluarga Tahun 2018 mengusung tema : “Mewujudkan PAUD yang berkualitas, inklusif dan berkesetaraan”. Dengan menghadirkan 500 orang peserta dari semua stake holder PAUD dan menggelar 7 workshop secara simultan, yaitu:

1. Workshop penataan satuan, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
2. Workshop Sinergi Peran Pemangku Kepentingan dalam Mewujudkan PAUD Berkualitas;
3. Workshop Percepatan Pendataan dan Pemenuhan Standar Nasional PAUD;
4. Workshop Diseminasi Model dan Praktek Baik PAUD dan Pendidikan Keluarga;
5. Workshop pelibatan keluarga dalam layanan PAUD;
6. Workshop Pembahasan Instrumen Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
7. Workshop Pembahasan Program Little Scientist.

Secara khusus, dialog ini diharapkan menghasilkan output sebagai berikut:

1. Kesepahaman dan peta jalan pelibatan pemangku kepentingan dalam mewujudkan PAUD Berkualitas;
2. Kajian penataan satuan, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD menuju terwujudnya PAUD berkualitas;
3. Model dan Praktik Baik PAUD dan Pendidikan Keluarga
4. Sinkronisasi data PAUD dan Rencana Aksi Pendataan dan Pemenuhan Standar Nasional PAUD;
5. Praktik baik pelibatan keluarga dalam layanan PAUD;
6. Instrumen Pemantauan Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, Laporan Perkembangan dan Instrumen Kesiapan Bersekolah.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL & GRAFIK.....	vi
Bab I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	4
D. Isi Strategis/Pemasalahan Utama	8
Bab II Perencanaan Kinerja	9
Bab III Akuntabilitas Kinerja	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Capaian Realisasi Anggaran	29
Bab IV Penutup	31
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja (Awal dan Revisi)	32
Lampiran 2 Tabel Pengukuran Kinerja	40
Lampiran 3 Rencana Kerja Tahunan	41

DaftarTabel & Grafik

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2018	9
Grafik 1	Alokasi Anggaran Per-Belanja Direktorat Pembinaan PAUD 2018	10
Grafik 2	Komposisi Anggaran Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2018	10
Grafik 3	Target Capaian Serapan Anggaran Direktorat Pembinaan PAUD 2018	12
Tabel 2	Pengukuran Kinerja Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2018	13
Tabel 3	Sebaran Bantuan Ruang Kelas Baru	17
Grafik 4	APK PAUD Tahun 2018	19
Tabel 4	Daftar Kabupaten/Kota Yang Telah Melaksanakan Penuntasan Ikut PAUD Minimal Satu Tahun Pra SD	23
Tabel 5	Sebaran Bantuan PKG PAUD	25
Tabel 6	Rekap Judul NSPK Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2018	27
Grafik 5	Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2018	30
Tabel 7	Kondisi Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan PAUD per-Subdit	30

BAB I Pendahuluan

A. GAMBARAN UMUM

Pencapaian 100 tahun Indonesia merdeka antara lain ditentukan dengan cara bagaimana kita memanfaatkan peluang bonus demografi dengan menyiapkan tenaga kerja yang berlimpah. Anak usia 0–6 tahun yang tahun 2010 yang berjumlah 32,5 juta orang, pada tahun 2045 usia mereka telah mencapai 35 – 41 tahun (*Hasil SP 2010*). Sementara itu anak usia 0-6 tahun pada tahun 2016 yang berjumlah 33,5 juta orang, pada tahun 2045 usia mereka telah mencapai 29 – 35 tahun (*Proyeksi Berdasarkan Hasil SP 2010*). Ini merupakan usia produktif, yang jika dipersiapkan baik sejak sekarang akan menjadi modal pembangunan, tetapi sebaliknya jika tidak dipersiapkan dengan baik justru kelak akan menjadi beban pembangunan.

Penyiapan SDM yang berkualitas sejak dini sejalan dengan program prioritas yang diamanatkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita ke-8 (melakukan revolusi karakter bangsa), Nawa Cita ke-5 (meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia), dan Nawa Cita ke- 6 (meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional).

Keberlanjutan suatu bangsa ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya, dan itu harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya.

Di banyak negara, anak usia dini diartikan sebagai anak sejak masih dalam kandungan sampai dengan usia 8 tahun. Hal itu dikarenakan selama periode tersebut sistem pusat syaraf, sel-sel otak dan jaringan neuron sudah terbangun, dan ini akan menjadi dasar bagi masa depan anak ketika dewasa (Irwin, Siddiqi, and Hertzman, 2007). Walaupun pengalaman-pengalaman yang didapat anak setelah periode itu masih dapat mengubah masa depannya, namun perkembangan anak pada saat usia dini akan berpengaruh terhadap kesehatan, perilaku dan hasil-hasil pembelajaran pada usia-usia selanjutnya (*Grantham-McGregor et al., 2007; Irwin, Siddiqi, and Hertzman, 2007; Mustard, 2007*). Jika pengembangan dan pendidikan/pembelajaran anak usia dini ditingkatkan, kemungkinan besar keadaan anak di usia selanjutnya akan jauh lebih sehat, bersemangat, produktif dan sukses. Banyak pakar mengakui bahwa anak dilahirkan dengan membawa kekhususannya masing-masing yang dipengaruhi oleh faktor keturunan, namun bagaimana anak berkembang akan sangat dipengaruhi pula oleh faktor lingkungan, yakni seberapa besar kesempatan dan pengalaman yang mereka dapatkan dari lingkungan (*Shonkoff and Phillips, 2000*)

Sementara itu berbagai hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dengan PAUD yang baik investasi pada jenjang pendidikan berikutnya akan lebih *cost effective*. Heckman (2003) berdasarkan hasil penelitiannya makin meyakinkan bahwa anak yang mengikuti PAUD dengan baik kelak mampu mengembalikan investasi beberapa kali lipat dibandingkan investasi serupa yang diberikan

setelah usia sekolah (di pendidikan sekolah) dan usia dewasa (*job training*).

Namun harus diakui bahwa ada banyak kendala dalam penanganan PAUD, diantaranya adalah **penanganan PAUD di daerah 3T¹, daerah rawan bencana, dan anak-anak yang berkebutuhan khusus**. Oleh karena itu diperlukan adanya pemihakan (afirmasi), dan PAUD adalah cara pemihakan yang paling tepat untuk mencapai tujuan Nawa Cita ke- 3 yakni “membangun dari pinggiran.”

Selain itu PAUD juga masih dihadapkan dengan **adanya disparitas partisipasi PAUD berdasarkan kondisi sosial ekonomi orangtua**. Berdasarkan hasil studi Bank Dunia (2013) masih terdapat disparitas antara yang kaya dan yang miskin, dalam hal ini yang miskin makin tertinggal keikutsertaannya dalam PAUD dibandingkan mereka yang kaya. Jika variabel sosial ekonomi dan letak geografis digabung, akan makin jelas kesenjangan (disparitas) dalam akses layanan PAUD antara kaya-miskin, kota-desa, dan antara kaya-miskin di kota dan desa. Anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak di pedesaan, apa-lagi sudah miskin, tinggal di pedesaan, dan ibunya berpendidikan rendah, merupakan kelompok anak yang makin tertinggal dalam mendapatkan layanan PAUD. (Source: World Bank, 2013: Endline data from the Impact Evaluation of the ECED project).

Secara umum perhatian pemerintah terhadap PAUD sudah menunjukkan perkembangan yang makin baik. Namun **belum adanya dukungan peraturan perundangan yang spesifik untuk PAUD** menjadikan penanganan PAUD di daerah 3T, rawan bencana, dan anak-anak yang berkebutuhan khusus, serta upaya mengurangi disparitas antara kaya-miskin dan desa-kota belum bisa optimal. Dampak lain dari belum adanya dukungan peraturan perundangan yang spesifik utk PAUD tersebut adalah kurang memadainya sinergi antar

berbagai lini (antara Pusat–Prov–Kab/Kota–Desa dan antara Pemerintah–*civil society*/masyarakat). Selain itu upaya untuk mendorong pihak-pihak yang semestinya berkontribusi dalam pembiayaan PAUD juga belum bisa maksimal.

Direktorat Pembinaan PAUD sebagai wakil pemerintah dalam membuat kebijakan telah memasukan **isu strategis untuk tahun 2018 dan kedepannya adalah mencapai target agenda pendidikan 2030 untuk PAUD yaitu “memastikan seluruh anak laki laki dan perempuan memperoleh akses terhadap perkembangan, perawatan dan pendidikan pra-SD (PAUD) yang bermutu untuk menjamin kesiapan memasuki pendidikan dasar.”** Hal tersebut sesuai dengan agenda tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang ke empat dan disebut sebagai agenda pendidikan 2030. Pada tahun 2017 didukung pula oleh dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menjadikan agenda untuk menjadikan PAUD lebih berkualitas.

Solusi untuk semuanya tadi perlu segera dipikirkan, terutama untuk menjamin adanya peningkatan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan (mutu dan jumlah), sarana prasarana, serta biaya operasional PAUD. Untuk itu sosialisasi dan promosi PAUD ke semua lini (termasuk Pemda dan organisasi kemasyarakatan) perlu ditingkatkan sehingga PAUD didukung oleh semua pihak (baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PAUD Formal dan Nonformal berada dibawah Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Pembinaan PAUD mempunyai 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian yakni : Subdirektorat Program dan Evaluasi; Subdirektorat Kurikulum; Subdirektorat Sarana dan Prasarana; Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan; dan Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya berkewajiban menyelenggarakan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan dan pembinaan PAUD yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemdikbud 2015 – 2019. Strategi, kebijakan, dan program yang dilaksanakan Direktorat Pembinaan PAUD dalam rangka pencapaian Renstra tersebut harus dipertanggungjawabkan sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Direktorat Pembinaan PAUD sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Atas dasar tersebut Direktorat Pembinaan PAUD menyusun laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pembinaan PAUD yang memuat semua laporan

kinerja yang telah dicapai selama setahun, diukur dengan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019. Selain sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program diharapkan laporan ini dapat mengukur kinerja pelaksanaan program yang telah berjalan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana program maupun memperbaiki kinerja Direktorat Pembinaan PAUD di masa yang akan datang.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 oleh Direktorat Pembinaan PAUD dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;



¹ Daerah 3T adalah daerah tertinggal, terpencil/terluar/terisolasi, dan terdepan/perbatasan dengan negara lain.

5. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reuvi atas laporan kinerja instansi pemerintah;
6. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015–2019;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2018.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini;
3. peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini;
4. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan anak usia dini;

5. pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini;
6. fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini;
7. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini;
8. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan anak usia dini;
9. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan anak usia dini; dan
10. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas Subdirektorat Program dan Evaluasi; Subdirektorat Kurikulum; Subdirektorat Sarana dan Prasarana; Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan; dan Subbagian Tata Usaha. Adapun perincian tugas Subdirektorat dan Subbagian di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :

1. Subdirektorat Program dan Evaluasi

Subdirektorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan; penyusunan program, kegiatan, dan anggaran; evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan laporan direktorat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan

penyajian data dan informasi di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini;

- c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- d. penyusunan bahan dan fasilitasi pendanaan pendidikan anak usia dini;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Subdirektorat Kurikulum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum pendidikan anak usia dini;



- program, kegiatan, dan anggaran Direktorat serta pendanaan pendidikan anak usia dini; dan
- f. penyusunan laporan Direktorat.

2. Subdirektorat Kurikulum;

Subdirektorat Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang kurikulum pendidikan anak usia dini.

- b. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pembelajaran dan penilaian pendidikan anak usia dini;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian pendidikan anak usia dini;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan penilaian pendidikan anak usia dini; dan



e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran dan penilaian pendidikan anak usia dini.

3. Subdirektorat Sarana dan Prasarana

Subdirektorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;
- penyusunan bahan dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;
- penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;
- penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini; dan
- pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini.

4. Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan;

Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi penjaminan mutu tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, dan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan anak usia

dini yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

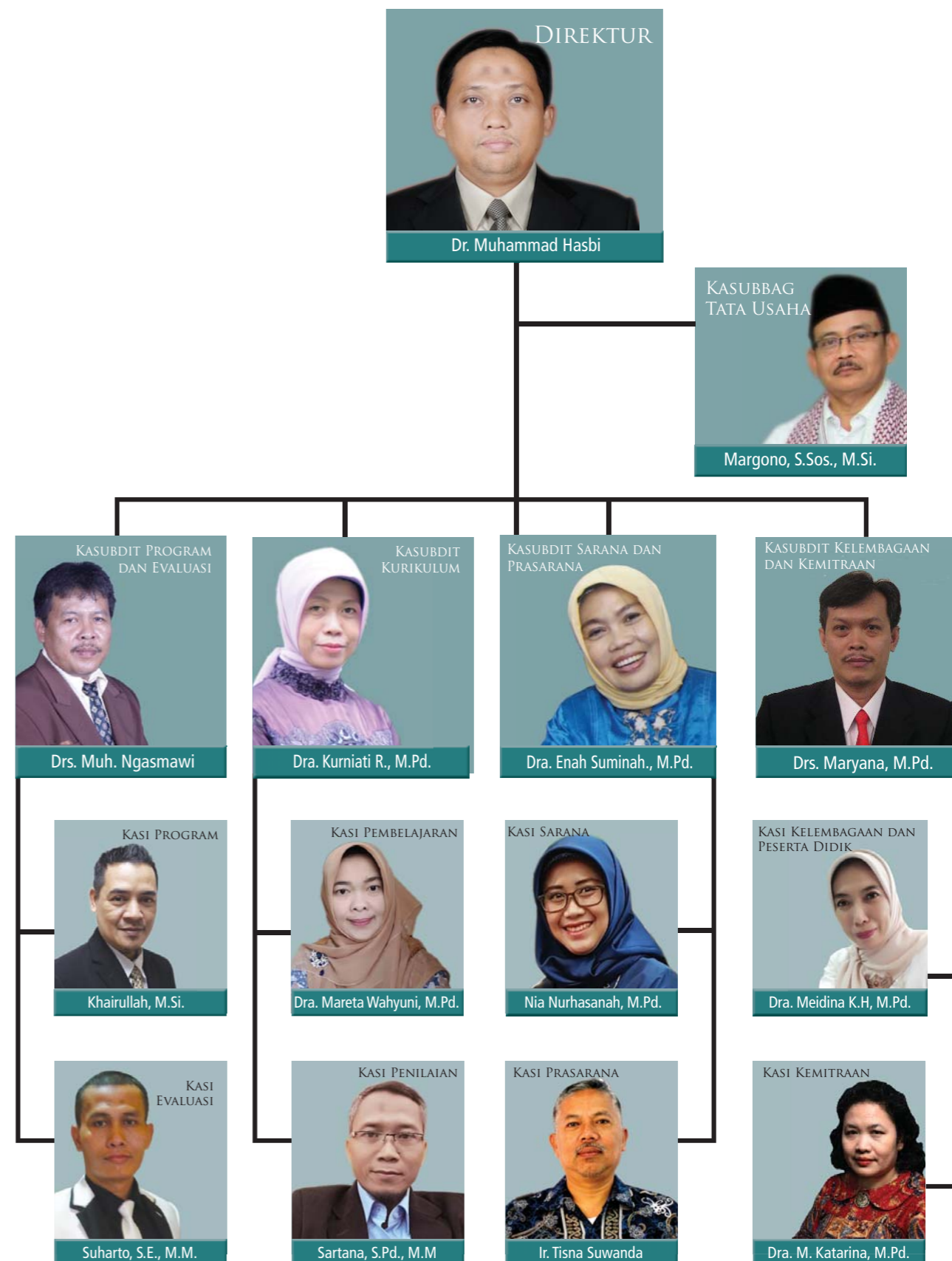
- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan anak usia dini;
- penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini;
- penyusunan bahan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini;
- penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu tata kelola pendidikan anak usia dini;
- penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan anak usia dini; dan
- pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang tata kelola dan kemitraan pendidikan anak usia dini.

5. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagan struktur organisasi Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut

Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan PAUD



D. ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN UTAMA

Saat ini Mendikbud RI adalah Presiden SEAMEO (*Southeast Asian Ministers of Education Organization*). Butir pertama dari tujuh prioritas SEAMEO adalah mencapai pendidikan universal bagi anak usia dini (PAUD). PAUD mulai menjadi prioritas di SEAMEO karena masih belum banyak negara di Asia Tenggara yang peduli PAUD. Untuk mendukung hal tersebut presiden telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembangunan Berkelanjutan, sebagai tindaklanjut Komitmen Dunia tentang *Sustainable Development Goal (SDG)*. Pada Perpres tersebut dimuat target SDG 4.2 yaitu "Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar." Pada tahun 2018 telah dikeluarkan PP Nomor 2 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang salah satunya untuk SPM PAUD, sehingga menjadi salah satu dasar bagi pelaksanaan PAUD di daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka yang menjadi isu strategis Direktorat Pembinaan PAUD dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018 adalah:

1. Layanan PAUD berkualitas yang menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
2. Penerapan PP Nomor 2 Tahun 2018 dalam peningkatan mutu layanan PAUD.
3. Kesiapan daerah dalam pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2018 .
4. Pelaksanaan PAUD HI di daerah maupun pusat.



BAB II Perencanaan Kinerja

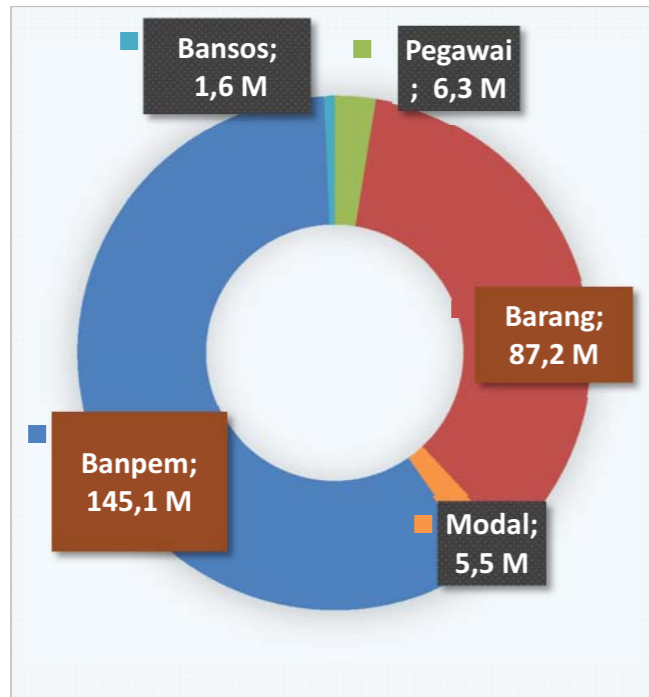
Perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan PAUD dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas merupakan tolak ukur kinerja sebagai evaluasi kinerja direktorat. Perjanjian Kinerja tersebut berisi sasaran program, indikator kinerja program, dan target kinerja Direktorat yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Berikut ini Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2018 yang dikutip dari lampiran perjanjian kinerja antara Direktur Pembinaan PAUD dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas.

Tabel 1.
Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2018

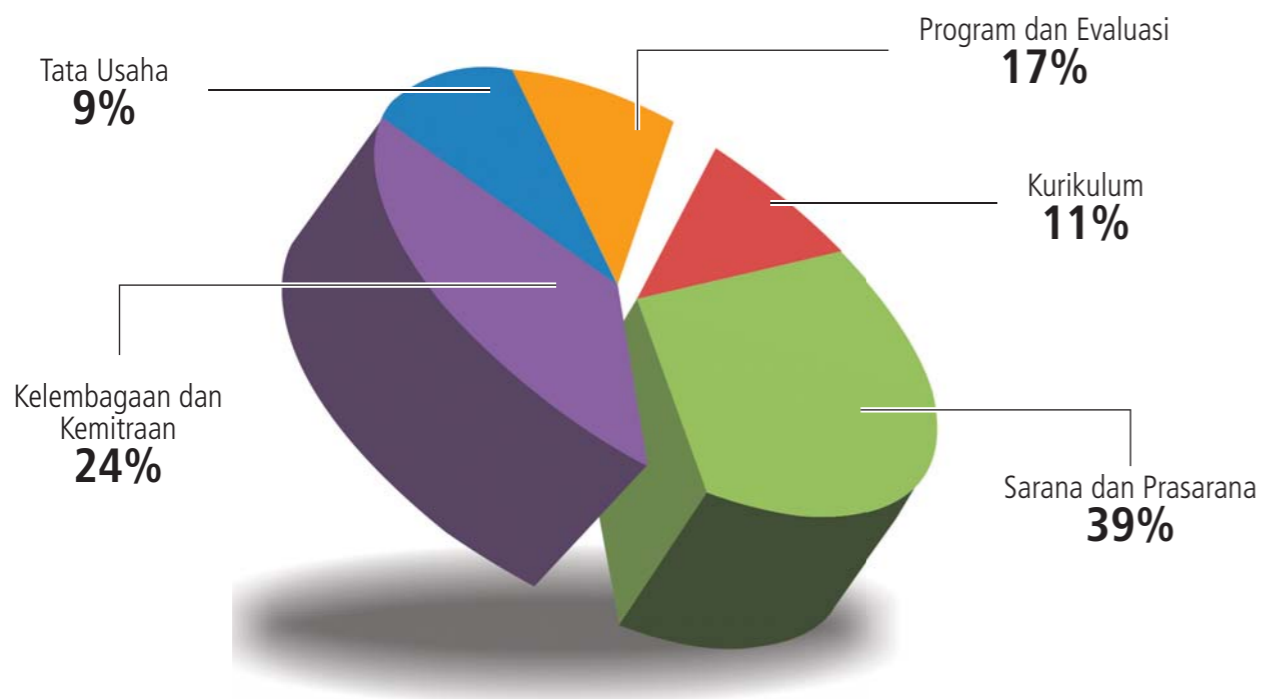
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018	
		TARGET	ANGGARAN
Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota	Jumlah lembaga PAUD terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T	215 Lembaga	55.571.982.000
	1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Gedung	160 Lembaga	26.437.024.000
	2. Lembaga PAUD Pembina dan di Daerah 3T Memperoleh Bantuan Pembangunan Gedung Baru	55 Lembaga	29.134.958.000
	Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE	90 lembaga	6.981.440.000
	1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Sarana Pembelajaran termasuk Alat Permainan Edukatif (APE)	80 lembaga	3.028.153.000
	2. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	10 lembaga	3.953.287.000
	Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir	128 lembaga	14.799.310.000
	1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD	128 lembaga	14.799.310.000
	Jumlah anak memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3-6 Tahun	5.500 anak	11.294.560.000
	1. Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan	5.500 anak	11.294.560.000
	Persentase Lembaga PAUD pembina menyelenggarakan PAUD holistik integratif	660 Lembaga	11.089.655.000
	1. Lembaga PAUD Pembina Menyelenggarakan Holistik Integratif	660 Lembaga	10.629.655.000
	2. Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan	1 Keg	460.000.000
	Jumlah lembaga yang melaksanakan kurikulum 2013 PAUD	5.869 lembaga	30.291.846.000
	1. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	5.869 lembaga	30.291.846.000
	Kabupaten/kota yang menyelenggarakan penuntasan PAUD minimal 1 Tahun pra SD	40 Kab/Kota	7.651.236.000
	1. Kabupaten/kota Menuntaskan PAUD Minimal 1 Tahun Pra-SD	40 Kab/Kota	7.651.236.000
	Jumlah dokumen penyelenggaraan HAN, Lomba dan Apresiasi	34 Lembaga	7.136.400.000
	1. Lembaga Mitra Memperoleh Bantuan Kerjasama Kelembagaan PAUD	34 Lembaga	2.646.125.000
	2. Lembaga/Mitra PAUD Memperoleh Peningkatan Kapasitas	2 Keg	4.490.275.000
	Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD	6.100 Lembaga	26.171.615.000
	1. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Memperoleh Bantuan Gugus PAUD	2.100 Lembaga	21.587.390.000
	2. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	4.000 lembaga	4.584.225.000
	Jumlah dokumen NSPK PAUD	29 Dok	28.515.944.000
	1. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD	29 Dok	13.012.790.000
	2. Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1	1 Layanan	15.503.154.000

Pada semester akhir di tahun 2018 ini anggaran Direktorat Pembinaan PAUD adalah sebesar **Rp217.4710.844.000,-**

Grafik 1.
Alokasi Anggaran Per-Belanja Direktorat Pembinaan PAUD 2018



Grafik 2
Komposisi Anggaran Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2018



Pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat didukung oleh salah satunya adalah kegiatan penyediaan layanan PAUD yang mempunyai sasaran strategis yaitu; Penyediaan Layanan PAUD Berstandar Nasional, yang berkesetaraan Anak Usia 3-6 Tahun Memperoleh Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang gender, berwawasan pendidikan dan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten dan kota, dan dalam pencapaiannya di dukung oleh 10 indikator kinerja.

Komponen kegiatan yang terdapat dalam 10 indikator kinerja mencerminkan peningkatan kualitas serta mutu dari lembaga PAUD diantaranya yaitu:

- 1. Jumlah lembaga PAUD terpadu pembinaan yang dibangun/revitalisasi dengan target 130 Lembaga dan anggaran Rp54.238.693.000, dan setelah revisi menjadi 215 Lembaga dan anggaran Rp55.571.982.000,-** didukung oleh output Lembaga PAUD memperoleh bantuan Rehabilitasi Gedung dengan target sebanyak 160 lembaga dan Lembaga PAUD Pembina dan di Daerah 3T memperoleh Bantuan Pembangunan Gedung Baru dengan target 55 lembaga.
- 2. Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE dengan target 6 lembaga dan anggaran Rp6.002.453.000, setelah revisi target menjadi 90 lembaga dan anggaran Rp6.981.440.000,** didukung oleh output Lembaga PAUD memperoleh Bantuan Sarana Pembelajaran termasuk Alat Permainan Edukatif (APE) berupa Pemberian Bantuan APE sebanyak 80 lembaga dan output Lembaga PAUD melaksanakan pembelajaran berkualitas sejumlah 10 lembaga.
- 3. Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir dengan target 40 lembaga dan anggaran**

Rp5.009.310.000, setelah revisi target menjadi 128 lembaga dan anggaran Rp14.799.310.000, didukung oleh output Lembaga PAUD memperoleh Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD sebanyak 128 lembaga.

- 4. Jumlah anak memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3 – 6 Tahun dengan target 9.500 anak dan anggaran Rp14.754.560.000, setelah revisi target menjadi 5.500 anak dan anggaran Rp11.294.560.000,** didukung oleh output Anak Usia Dini memperoleh pengasuhan dan perlindungan dengan target 5.500 anak.
- 5. Persentase Lembaga PAUD Pembina menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif dengan target 660 lembaga dan anggaran Rp11.089.655.000,** didukung oleh output Lembaga PAUD Pembina menyelenggarakan Holistik integratif dengan target 660 lembaga dan output Anak Usia Dini memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan dengan target satu kegiatan.
- 6. Jumlah Lembaga yang melaksanakan kurikulum 2013 PAUD dengan target 6.389 lembaga dan anggaran Rp45.956.120.000, setelah revisi target menjadi 5.869 lembaga dan anggaran Rp30.291.846.000,-** didukung oleh output Lembaga PAUD melaksanakan Pembelajaran Berkualitas dengan target 5.869 lembaga.
- 7. Kabupaten/kota yang menyelenggarakan penuntasan PAUD minimal 1 Tahun pra SD dengan target 40 kab./kota dan anggaran Rp9.379.000.000, setelah revisi target tetap dan anggarana Rp7.651.236.000,** didukung oleh output Kabupaten/kota menuntaskan PAUD minimal 1 Tahun Pra-SD dengan target di 40 kab./kota.
- 8. Jumlah dokumen penyelenggaraan HAN, Lomba, dan Apresiasi dengan target 34 lembaga dan anggaran Rp7.591.950.000, setelah revisi**

target tetap dan anggaran menjadi Rp7.136.400.000, didukung oleh output Lembaga mitra memperoleh bantuan kerjasama kelembagaan PAUD dengan target 34 Lembaga dan output lembaga/mitra PAUD memperoleh peningkatan kapasitas dengan target dua kegiatan.

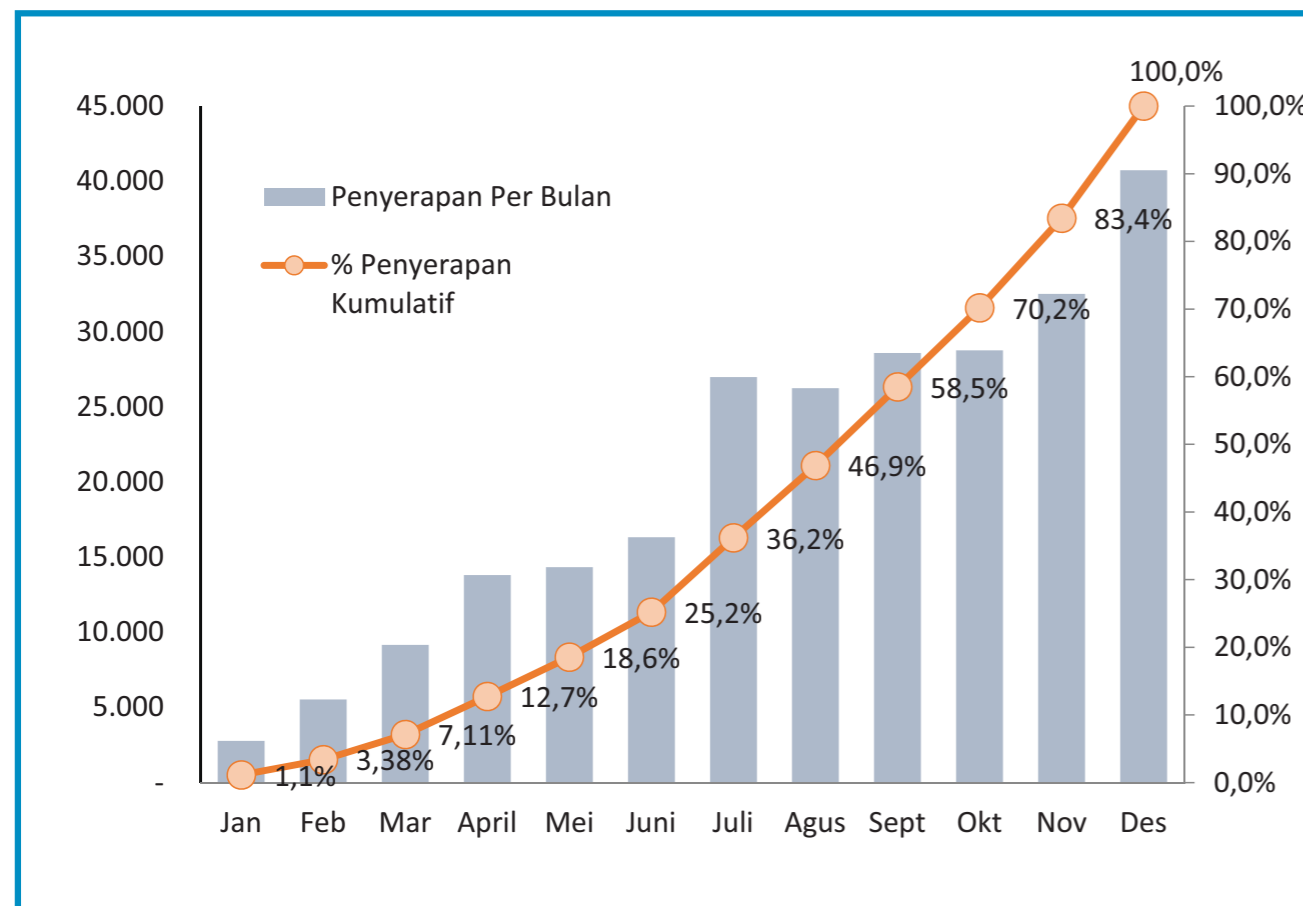
9. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD dengan target 6.100 lembaga dan anggaran Rp28.310.380.000, setelah revisi target tetap dan menjadi anggaran Rp26.171.615.000, didukung oleh output Pusat Kegiatan Gugus (PKG) memperoleh bantuan Gugus PAUD dengan target 2.100 lembaga dan output lembaga PAUD melaksanakan pembelajaran berkualitas dengan target 4.000 lembaga.

10. Jumlah dokumen NSPK PAUD dengan target 29 Dokumen dan anggaran Rp13.599.020.000 setelah revisi target tetap dan anggaran menjadi Rp28.515.944.000,-didukung oleh output Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD dengan target 29 dokumen dan output layanan dukungan manajemen eselon 1.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta optimalisasi penggunaan anggaran secara transparan, terukur, tepat waktu, dan akuntabel, Direktorat Pembinaan PAUD menetapkan target capaian serapan anggaran tahun 2018 yaitu sebesar 100% sama halnya dengan fisik target harus mencapai 100%. Target dan capaian realisasi anggaran tersebut digambarkan dalam kurva berikut:

Grafik 3.

Target Capaian Serapan Anggaran Direktorat Pembinaan PAUD 2018



BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja dilihat dari seberapa tinggi tingkat pencapaian target perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Direktur Pembinaan PAUD dan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas. Direktorat Pembinaan PAUD berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Realisasi capaian kinerja dan anggaran Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2018 tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.
Pengukuran Kinerja Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018		TAHUN 2018 REALISASI			
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	%	ANGGARAN	%
Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota	Jumlah lembaga PAUD terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T	215 Lembaga	55.571.982.000	215 Lembaga	100	54.518.625.120	98,10
	1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Gedung	160 Lembaga	26.437.024.000	160 Lembaga	100	26.261.106.640	99,33
	2. Lembaga PAUD Pembina dan di Daerah 3T Memperoleh Bantuan Pembangunan Gedung Baru	55 Lembaga	29.134.958.000	55 Lembaga	100	28.257.518.480	96,99
	Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE	90 Lembaga	6.981.440.000	90 Lembaga	100	6.593.553.860	94,44
	1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Sarana Pembelajaran termasuk Alat Permainan Edukatif (APE)	80 Lembaga	3.028.153.000	80 Lembaga	100	2.829.283.860	93,43
	2. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	10 lembaga	3.953.287.000	10 lembaga	100	3.764.270.000	95,22
	Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir	128 lembaga	14.799.310.000	128 lembaga	100	14.660.275.000	99,06
	1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD	128 lembaga	14.799.310.000	128 lembaga	100	14.660.275.000	99,06
	Jumlah anak memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3-6 Tahun	5.500 anak	11.294.560.000	5.500 anak	100	11.251.531.390	99,62
	1. Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan	5.500 anak	11.294.560.000	5.500 anak	100	11.251.531.390	99,62

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018		TAHUN 2018 REALISASI			
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	%	ANGGARAN	%
	Persentase Lembaga PAUD pembina menyelenggarakan PAUD holistik integratif	660 Lembaga	11.089.655.000	660 Lembaga	100	10.963.534.398	98,86
	1. Lembaga PAUD Pembina Menyelenggarakan Holistik Integratif	660 Lembaga	10.629.655.000	660 Lembaga	100	10.629.655.000	100,00
	2. Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan	1 Keg	460.000.000	1 Keg	100	333.879.398	72,58
	Jumlah lembaga yang melaksanakan kurikulum 2013 PAUD	5.869 lembaga	30.291.846.000	5.869 lembaga	100	29.518.842.556	97,45
	1. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	5.869 lembaga	30.291.846.000	5.869 lembaga	100	29.518.842.556	97,45
	Kabupaten/kota yang menyelenggarakan penuntasan PAUD minimal 1 Tahun pra SD	40 Kab/Kota	7.651.236.000	40 Kab/Kota	100	7.614.019.050	99,51
	1. Kabupaten/kota Menuntaskan PAUD Minimal 1 Tahun Pra-SD	40 Kab/Kota	7.651.236.000	40 Kab/Kota	100	7.614.019.050	99,51
	Jumlah dokumen penyelenggaraan HAN, Lomba dan Apresiasi	34 Lembaga	7.136.400.000	34 Lembaga	100	6.859.928.150	96,13
	1. Lembaga Mitra Memperoleh Bantuan Kerjasama Kelembagaan PAUD	34 Lembaga	2.646.125.000	34 Lembaga	100	2.582.719.100	97,60
	2. Lembaga/Mitra PAUD Memperoleh Peningkatan Kapasitas	2 Keg	4.490.275.000	2 Keg	100	4.277.209.050	95,25
	Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD	6.100 Lembaga	26.171.615.000	6.100 Lembaga	100	25.075.703.160	95,81
	1. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Memperoleh Bantuan Gugus PAUD	2.100 Lembaga	21.587.390.000	2.100 Lembaga	100	21.508.025.000	99,63
	2. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	4.000 lembaga	4.584.225.000	4.000 lembaga	100	3.567.678.160	77,83
	Jumlah dokumen NSPK PAUD	29 Dok	28.515.944.000	29 Dok	100	26.881.585.882	94,27
	1. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD	29 Dok	13.012.790.000	29 Dok	100	11.776.766.032	90,50
	2. Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1	1 Layanan	15.503.154.000	1 Layanan	100	15.104.819.850	97,43

1. Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina yang dibangun/revitalisasi pada tahun 2018 dengan target 215 lembaga, dan didukung oleh dua output yaitu:

a. Lembaga PAUD memperoleh Bantuan Rehabilitasi Gedung Pemberian Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD.

Pada akhir tahun 2018 output ini

mencapai realisasi sebanyak 160 lembaga PAUD atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Sebaran penerima bantuan ini ada di 66 Kab/Kota. Tujuan dari bantuan ini adalah 1) meningkatkan akses dan mutu PAUD dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas layanan PAUD yang berkualitas; 2) meningkatkan dukungan dan partisipasi lembaga organisasi mitra dalam peningkatan layanan PAUD

berkualitas; 3) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan PAUD berkualitas.

Sekalipun kegiatan sudah terealisasi sesuai target namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan diantaranya adalah ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan pekerjaan di lapangan, hal ini disebabkan kurang maksimalnya pemanfaatan jasa perencana dan pengawas (lembaga mengerjakan sendiri proses rehab).

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut di atas langkah antisipasi yang dilakukan adalah:

- 1) Dilakukan verifikasi data kerusakan bangunan oleh Tim Verifikator;
- 2) Dilakukan verifikasi RAB oleh Tim Teknis pada saat kegiatan penguatan.

dan solusi jika terjadi ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan pekerjaan di lapangan adalah diajukannya perubahan RAB kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Jika dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat penurunan sasaran 15 lembaga, hal ini dikarenakan penurunan anggaran yang dialihkan pada program prioritas lainnya.

b. Lembaga PAUD Pembina dan di Daerah 3T memperoleh Bantuan Pembangunan Gedung Baru

Output ini didukung 2 (dua) kegiatan utama kegiatan pertama adalah Pemberian Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD di daerah 3T sebanyak 40 lembaga dan sudah terealisasi 100% dengan tersebar di 20 Kab/Kota. Kegiatan kedua adalah

Pemberian Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Percontohan sebanyak 15 lembaga dan sudah terealisasi sesuai target yaitu 15 lembaga PAUD dengan sebaran di 15 Kab/Kota. Sekalipun kegiatan sudah terealisasi sesuai target namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan diantaranya :

- 3) ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan pekerjaan di lapangan, misalnya terjadinya perubahan harga upah pekerja.
- 4) waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai jadwal yang diajukan dalam proposal, hal ini disebabkan adanya penundaan pemberian bantuan, rencananya bantuan UGB Pembina akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 menjadi tahun anggaran 2017, sehingga terjadinya perubahan Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan.

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut di atas langkah antisipasi yang dilakukan adalah:

- 1) Dilakukan survey harga satuan sebelum menentukan RAB oleh lembaga calon penerima bantuan;
- 2) Apabila terjadi perubahan waktu pelaksanaan pemberian bantuan dilakukan verifikasi ulang terhadap RAB yang diajukan oleh Tim Teknis pada saat kegiatan penguatan, dan solusi jika terjadi ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan pekerjaan di lapangan adalah diajukannya perubahan RAB kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Capaian indikator ini pada akhir tahun 2018 mencapai 100% untuk fisiknya sedangkan anggaran **98,1%** dari total anggaran **Rp54.518.625.120**.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%
Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota	1. Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina yang dibangun/ revitalisasi	230 lembaga	215 lembaga	215 lembaga	100%

2. Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE dengan target 90 lembaga dan di dukung oleh 2 (dua) output:

- Lembaga PAUD memperoleh Bantuan Sarana Pembelajaran termasuk Alat Permainan Edukatif (APE) pada akhir tahun 2018 telah terealisasi 80 lembaga yang tersebar di 60 Kab/ Kota. Capaian kinerja untuk output ini mencapai 100%, dan terjadi kenaikan target dari perjanjian kinerja awal yang hanya mempunyai target 40 lembaga. Perubahan target ini disebabkan menurunnya satuan bantuan yang diberikan dari Rp50.000.000 menjadi Rp25.000.000.
- Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas
Output ini didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan PAUD Berbasis Teknologi yang pada tahun 2018 diberikan kepada TMII dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pustaka Mainan sebanyak 10 Lembaga. Pada akhir tahun 2018 telah terealisasi 100% dari target yang direncanakan yaitu untuk

Peningkatan Kapasitas Pustaka Mainan telah diterima oleh 10 lembaga dan tersebar di 9 Kab/Kota.

Tujuan dari kegiatan yang mendukung IKK Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE adalah untuk peningkatan mutu bagi lembaga-lembaga PAUD. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat penurunan sasaran sebanyak 2.866 lembaga, hal ini dikarenakan anggaran diprioritaskan untuk kegiatan dan bantuan lainnya.

Untuk Bantuan sarana pembelajaran dalam bentuk bantuan pustaka mainan (*Toys Library*) dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan diantaranya adalah kesulitan lembaga untuk mengidentifikasi jenis mainan yang akan dibeli, hal ini disebabkan oleh belum adanya standar minimal untuk mainan yang ada di dalam pustaka mainan (*Toys Library*).

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut di atas langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan melampirkan jenis mainan yang ada di dalam Pustaka mainan (*Toys Library*) di dalam Juknis bantuan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%
Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota	2. Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE	2.956 lembaga	90 lembaga	90 lembaga	100%

3. Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir dengan target sejumlah 128 lembaga pada akhir tahun telah memenuhi target 100%. Bantuan terhadap 128 lembaga PAUD ini tersebar 89 Kab/Kota.

Tabel 3
Sebaran Bantuan Ruang Kelas Baru

NO	PROVINSI	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH LEMBAGA	BESAR BANTUAN	TOTAL BANTUAN
1	Aceh	4	6	Rp110,000,000	Rp660,000,000
2	Banten	4	8	Rp110,000,000	Rp880,000,000
3	D.I Yogyakarta	1	1	Rp110,000,000	Rp110,000,000
4	Gorontalo	1	1	Rp110,000,000	Rp110,000,000
5	Jambi	1	1	Rp110,000,000	Rp110,000,000
6	Jawa Barat	12	26	Rp110,000,000	Rp2,860,000,000
7	Jawa Tengah	12	15	Rp110,000,000	Rp1,650,000,000
8	Jawa Timur	12	15	Rp110,000,000	Rp1,650,000,000
9	Kalimantan Barat	2	2	Rp110,000,000	Rp220,000,000
10	Kalimantan Utara	3	3	Rp110,000,000	Rp330,000,000
11	Kalimantan Selatan	1	2	Rp110,000,000	Rp220,000,000
12	Kalimantan Tengah	1	1	Rp110,000,000	Rp110,000,000
13	Kepulauan Riau	1	1	Rp110,000,000	Rp110,000,000
14	Lampung	3	3	Rp110,000,000	Rp330,000,000
15	Maluku Utara	6	7	Rp110,000,000	Rp770,000,000
16	NTB	5	13	Rp110,000,000	Rp1,430,000,000
17	NTT	5	6	Rp110,000,000	Rp660,000,000
18	Riau	1	2	Rp110,000,000	Rp220,000,000
19	Sulawesi Tengah	1	1	Rp110,000,000	Rp110,000,000
20	Sulawesi Utara	1	1	Rp110,000,000	Rp110,000,000
21	Sulawesi Selatan	2	2	Rp110,000,000	Rp220,000,000
22	Sumatera Barat	5	5	Rp110,000,000	Rp550,000,000
23	Sumatera Selatan	3	3	Rp110,000,000	Rp330,000,000
24	Sumatera Utara	2	3	Rp110,000,000	Rp330,000,000
Total		89 Kab./ Kota	128 Lembaga		

Kendala dalam pelaksanaan bantuan ini adalah penggunaan dana hanya dikhususkan untuk penambahan ruang belajar saja. Tidak dialokasikan sebagian untuk penambahan fasilitas lainnya seperti toilet maupun pemagaran lingkungan sekolah, sementara toilet sangat diperlukan bagi anak. Sehingga diharapkan besarnya dana bisa ditambah untuk toilet.

Sekalipun kegiatan sudah terealisasi sesuai target namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan diantaranya adalah

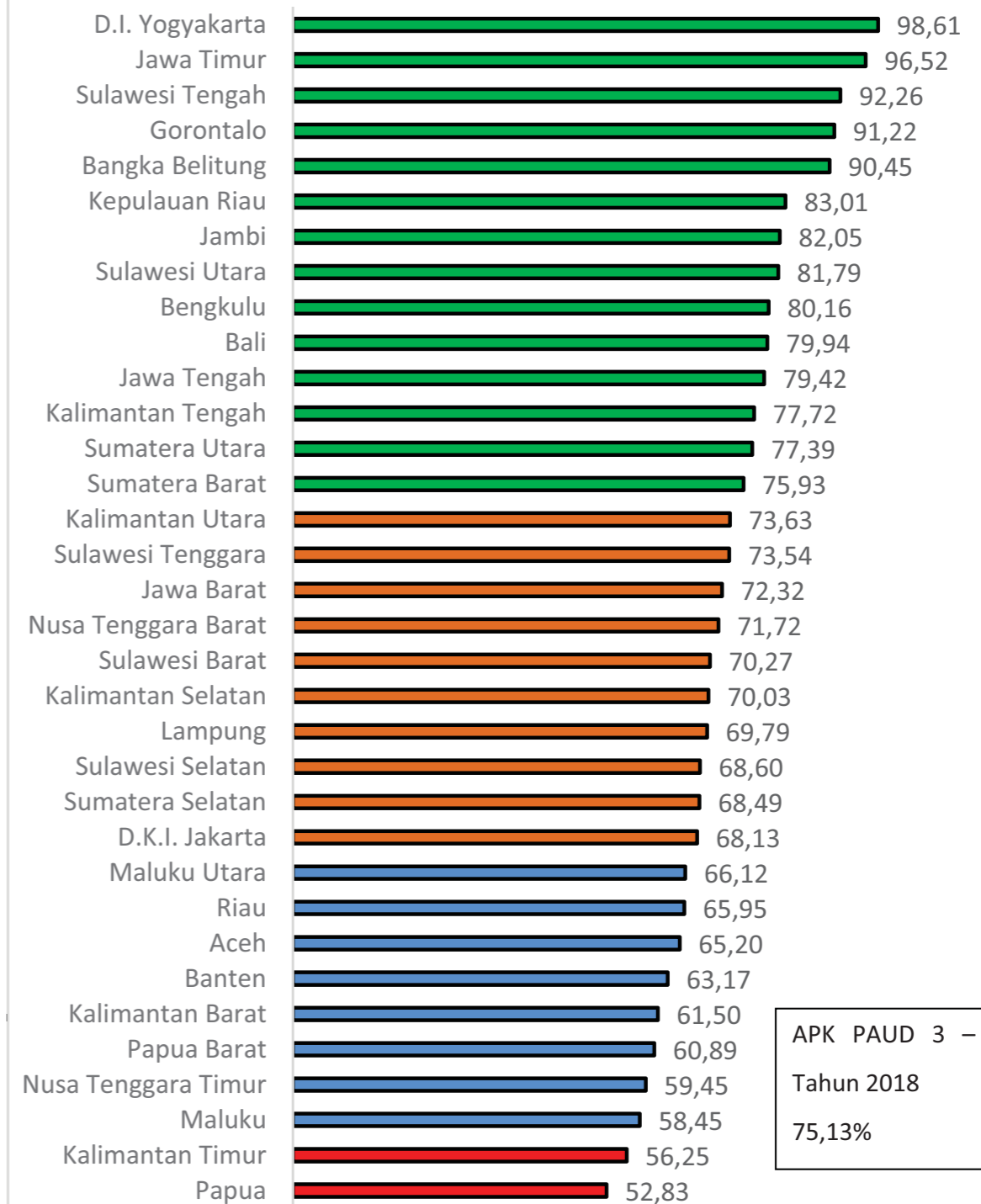
- Setelah menerima dana ada lembaga yang tidak mengerjakan pekerjaannya, dan belum bisa melakukan pengembalian ke kas Negara.
- Adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan karena adanya miskomunikasi proses transfer anggaran di rekening penerima bantuan dengan bank penyalur.
- Waktu penyelesaian yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut di atas langkah antisipasi yang dilakukan adalah:

- Menyampaikan surat teguran ke lembaga penerima bantuan melalui dinas pendidikan agar

Grafik 4
APK PAUD Tahun 2018

Grafik APK PAUD 2018/2019



BOP PAUD diberikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu BOP PAUD Non Fisik dan BOP untuk anak berkebutuhan khusus (BOP ABK). BOP Nonfisik disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK),

- lembaga segera mengembalikan dana yang sudah diterima ke kas negara;
- b. Revisi dengan bank penyalur untuk menyampaikan laporan kliring maksimal 3 hari setelah proses pencairan.
- c. Lembaga membuat surat pernyataan Permohonan waktu perpanjangan pekerjaan ke Pejabat Pembuat Komitmen.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat peningkatan sasaran sebanyak 28 lembaga, hal ini dimungkinkan karena banyaknya lembaga PAUD yang membutuhkan bantuan unit gedung baru, hal ini diperoleh dari data hasil monitoring bantuan yang dilakukan.



Bantuan Ruang Kelas Baru POS PAUD Mandiri – Ciamis – Jawa Barat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2017	TAHUN 2018		
			TARGET	REALISASI	%
Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota	3. Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir	100 lembaga	128 lembaga	128 lembaga	100%

4. Jumlah anak memperoleh Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP PAUD) untuk anak usia 3-6 Tahun

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah anak memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3-6 tahun mendukung pencapaian indikator kinerja program (IKP) APK PAUD usia 3-6 tahun. Tahun 2018 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini usia 3 – 6 Tahun mencapai 75,13 % melebihi target Renstra. Tercapainya APK PAUD 100,03% anak merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya dana BOP PAUD yang dilokasikan di kab./kota/prov. DKI Jakarta. Peningkatan dana DAK BOP PAUD cukup signifikan, dimana pada tahun 2017 sebesar Rp3.358.504.200.000 menjadi Rp4.070.194.800.000 pada tahun 2018.

sedangkan BOP ABK diberikan langsung dari satker PAUD Pusat. Pencapaian IKK Jumlah anak memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3-6 tahun ini didukung oleh output Anak Usia Dini memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan dengan bentuk kegiatan pemberian BOP ABK dan Pemberian Bantuan PAUD Layanan Khusus/Marjinal. Pemberian BOP ABK ditargetkan adalah 2.500 anak, dengan jumlah anggaran Rp3.750.000.000,- yang tersebar di 75 kab./kota. Direktorat pembinaan PAUD juga memberikan untuk daerah marjinal dengan memberikan bantuan PAUD layanan khusus (PAUD LK) untuk 200 lembaga dengan jumlah anggaran Rp5.000.000.000,-. Program ini hingga akhir tahun 2018 terealisasi 100% dengan sebaran di 68 Kab/Kota.

Kendala dalam pencapaian target IKK ini adalah BOP telah di DAK ke masing-masing kab/kota sehingga dalam hal pelaporan masih lambat dan belum semua kab/kota langsung melaporkan ketercapaian BOP ke pusat. Selain daripada itu karena DAK maka dalam hal pencairan banyak mengalami kendala dikarenakan peraturan yang memayungi pencairan BOP ada dua kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2017	TAHUN 2018		
			TARGET	REALISASI	%
Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota	4. Jumlah anak memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3-6 Tahun (IKK)	7.500 anak	5.500 anak	5.500 anak	100%

5. Persentase Lembaga PAUD pembina menyelenggarakan PAUD holistik integratif

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Lembaga PAUD Pembina menyelenggarakan PAUD holistik integratif merupakan IKK baru yang dimasukkan pada revisi renstra. Hal ini dimasukkan untuk mendukung program pemerintah yang telah dimulai dari tahun 2013 dengan dikeluarkannya PP Nomor 60 tentang pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan dengan telah dibuatnya RAN PAUD HI. IKK ini didukung oleh dua output yaitu Lembaga PAUD Pembina menyelenggarakan Holistik Integratif dan Anak Usia Dini memperoleh pengasuhan dan perlindungan.

Output lembaga PAUD Pembina menyelenggarakan Holistik Integratif didukung oleh kegiatan pemberian bantuan makanan sehat dan bantuan layanan PAUD usia 0 – 3 tahun, dengan target 660

lembaga. Pada akhir tahun 2018 telah terealisasi 100% dengan sebaran di 160 kab/kota untuk pemberian makanan sehat, sedangkan untuk bantuan layanan PAUD usia 0 – 3 tahun telah tersalurkan ke 200 lembaga di 79 Kab/Kota.

Pencapaian IKK ini pada tahun 2018 telah mencapai 74,8% melebihi dari target renstra, hal ini bisa terlihat dari jumlah lembaga PAUD Pembina yang telah melaksanakan PAUD HI menurut dapodik. TK Pembina yang berjumlah 3.440 dan yang telah melaksanakan PAUD HI dalam hal telah bekerjasama minimal dengan Puskemas ada 2.574 lembaga. Sedangkan pelaksanaan PAUD HI di setiap lembaga sudah menyatu dalam kurikulum 2013, dimana ada pengasuhan, perlindungan, kesehatan, gizi dan parenting, sehingga secara pembelajaran di PAUD semua lembaga PAUD harus sudah melakukan PAUD HI (Pembinaan Anak Usia Dini Holistik integratif).

Kendala dalam pencapaian target ini adalah masih banyak lembaga dalam melaksanakan PAUD HI belum berada dalam satu layanan yang bersama-sama baik itu dengan BKB, Posyandu maupun Puskemas. Tetapi hal ini pun dikarenakan belum ada juknis yang terpadu dengan kementerian yang lain yang ada dalam gugus tugas bagaimana cara koordinasi dilapangan agar pelaksanaan PAUD HI lebih terstruktur dan terorganisasi dengan baik.

Penyelenggaraan PAUD HI seperti yang telah dikonsepsikan oleh Bappenas dapat diwujudkan melalui dua cara;

- Keberadaan lembaga-lembaga penyelenggara PAUD pada suatu wilayah → **masing-masing melakukan pelayanan pada aspek tertentu, dengan bekerja sama dan berkoordinasi.**
- Keberadaan lembaga penyelenggara PAUD pada suatu wilayah → melakukan fungsi pelayanan yang holistik secara menyeluruh (**satu atap**).

Berdasarkan hal tersebut masih perlu kiranya koordinasi yang lebih baik antar kementerian yang terkait dalam pelaksanaan PAUD HI, hal ini telah dimulai dengan adanya RAN PAUD HI dan telah dikoodinasikan oleh Bappenas dan di-permenkan oleh kementerian koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2017	TAHUN 2018		
			TARGET	REALISASI	%
Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota	5. Persentase Lembaga PAUD Pembina menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif	36%	50%	74,8%	149,6%

6. Jumlah Lembaga yang melaksanakan kurikulum 2013 PAUD

Indikator Kinerja Kegiatan ini didukung oleh output Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas sebanyak 5.869 Lembaga dan terealisasi 5.869 lembaga. Indikator ini didukung oleh 3 kegiatan besar yaitu Peningkatan Kapasitas Implementasi Kurikulum 2013 PAUD, Pembinaan Lembaga PAUD yang Sudah Terakreditasi, Peningkatan Kapasitas/Magang Lembaga Penyelenggara PAUD, Peningkatan Kapasitas PAUD Pembina/Negeri, Peningkatan Kapasitas Pamong dan Penilik PAUD, Pengembangan *Little Scientist* Pada Lembaga PAUD, Pemberian Bantuan Lembaga TUK-PAUD, Pendampingan Layanan PAUD Berkualitas.

Untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas tahun 2018 Direktorat Pembinaan PAUD memberikan penguatan melalui implementasi kurikulum 2013 PAUD. Adapun realisasi yang dicapai adalah

1.600 guru/pendidik di 20 kab./kota dari target 1.520 orang guru/Pendidik di 19 Kab./Kota, target yang dicapai 105%. Kegiatan Implementasi kurikulum 2013 PAUD di laksanakan sebanyak 19 angkatan, per angkatan peserta yang di undang sebanyak 80 orang yang merupakan pendidik/ pengelola satuan PAUD yang berasal dari kecamatan tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait kurikulum 2013 PAUD, yakni: mengenai perencanaan, keaksaraan, bahasa, matematik, penilaian, dll. Peserta diberikan sedikit teori dan banyak kegiatan praktek, sehingga peserta dapat melihat dan mempraktekan secara langsung materi yang di sampaikan narasumber.

Masalah yang dihadapi adalah banyak lembaga PAUD dan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) yang belum siap untuk mengajukan akreditasi lembaga PAUD. Demikian pula adanya lembaga PAUD yang

mendapat nilai akreditasi C belum siap untuk meningkatkan nilai ke akreditasi B serta keberadaan penilik dan pengawas PAUD di lapangan banyak yang belum memahami program PAUD.

Berdasarkan hasil pemantauan dari Direktorat Pembinaan PAUD, Dinas Pendidikan belum optimal melaksanakan pembinaan lembaga PAUD yang sudah terakreditasi bagi lembaga SPK, sehingga ada beberapa lembaga SPK yang belum memperpanjang izin operasional lembaganya.

Terkait dengan masalah tersebut diatas, maka Direktorat Pembinaan PAUD senantiasa melakukan pembinaan bagi lembaga PAUD melalui kegiatan Orientasi Teknis Pembinaan Lembaga PAUD yang sudah terakreditasi berupaya melakukan pemerataan dengan penyampaian informasi tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dengan menerbitkan buku PAUD Berkualitas yang isinya tentang 8 Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, demikian pula diharapkan Dinas Pendidikan kabupaten/kota diharapkan mampu memberikan pembinaan bagi lembaga PAUD yang belum maupun yang sudah terakreditasi terkait penyelenggaraan program PAUD di lapangan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2017	TAHUN 2018		
			TARGET	REALISASI	%
Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota	6. Jumlah lembaga yang melaksanakan kurikulum 2013 PAUD	2.300 lembaga	5.869 lembaga	5.869 Lembaga	100%

7. Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan penuntasan PAUD minimal 1 tahun Pra SD.

IKK ini mempunyai output Lembaga PAUD melaksanakan pembelajaran berkualitas dengan target 40 kab./kota. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan Penuntasan Ikut PAUD 1 tahun Pra SD dan di 14 kab./kota, tetapi kabupaten/kota yang ikut Penuntasan Ikut PAUD 1 tahun Pra SD pada tahun 2018 total keseluruhannya adalah 90 kab/kota yang tersebar di 26 Provinsi. Pencapaian tersebut dikarenakan banyak kabupaten/kota telah melaksanakan secara mandiri dengan biaya sendiri. Tujuan dari penuntasan wajib PAUD satu tahun Pra SD adalah perluasan akses PAUD berkualitas yang mendukung pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa pada tahun 2030. Pelaksanaan Penuntasan Ikut

PAUD Pra SD mendorong Kabupaten/Kota untuk memiliki komitmen tinggi terhadap program PAUD melacak tuntas anak yang berusia 5 – 6 tahun dilayani di PAUD. Untuk mendukung pelaksanaan Penuntasan Ikut PAUD Pra SD berkualitas harus tersedia lembaga tempat rujukan pembelajaran yang mendukung anak siap masuk sekolah.

Dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi peningkatan dalam hal pemberian bantuan untuk pelaksanaan Penuntasan Ikut PAUD Pra SD menjadi 40 Kab./kota dimana pada tahun sebelumnya hanya 20 Kab/kota. Hal ini disebabkan kenaikan anggaran dan focus pemerintah untuk mendorong SDGS 4.2 "Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar".



Kegiatan Pra- SD Palangkaraya

Tabel 4
Daftar Kabupaten/Kota Yang Telah Melaksanakan Penuntasan Ikut PAUD Minimal Satu Tahun Pra SD

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Tahun
1	NTT	1 Kab. Sumba Barat Daya	2016
		2 Kab. Kupang	2017
		3 Kab. Belu	2017
		4 Kab. Manggarai Barat	2018
		5 Kab. Nagekeo	2018
2	Jawa Barat	6 Kab. Bandung	2017
		7 Kab. Karawang	2017
		8 Kab. Kuningan	2017
		9 Kab. Ciamis	2017
		10 Kab. Bogor	2017
		11 Kota Bandung	2016
		12 Kab. Garut	2018
3	Jambi	13 Kota Jambi	2016
		14 Kab. Tanjabtim	2018
4	Jawa Timur	15 Kab. Banyuwangi	2016
		16 Kab. Jombang	2017
		17 Kab. Bojonegoro	2017
		18 Kota Batu	2018
		19 Kab. Tuban	2018
		20 Kab. Gresik	2018
		21 Kab. Bantul	2016
5	DIY	22 Kab. Sleman	2016
		23 Kab. Gunung Kidul	2016
		24 Kab. Kulon Progo	2016

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Tahun
6	Aceh	25 Kota Yogyakarta	2016
		26 Kab. Aceh Utara	2017
		27 Kab. Aceh Selatan	2017
		28 Kab. Bireun	2018
		29 Kota Banda Aceh	2018
		30 Kota Sabang	2018
7	Sumatera Utara	31 Kab. Humbang Hasundutan	2017
		32 Kab. Deli Serdang	2018
		33 Kota Medan	2018
		34 Kab. Mandailing Natal	2018
8	Sumatera Barat	35 Kab. Sijunjung	2017
		36 Kota Padang	2018
9	Lampung	37 Kab. Lampung Timur	2017
		38 Kota Bandar Lampung	2018
		39 Kab. Lampung Tengah	2018
10	Riau	40 Kab. Kampar	2017
		41 Kab. Bengkalis	2017
		42 Kab. Indragiri Hulu	2017
		43 Kab. Indragiri Hilir	2017
		44 Kab. Pelalawan	2017
		45 Kab. Rokan Hulu	2017
		46 Kab. Rokan Hilir	2017
		47 Kab. Siak	2017
48 Kab. Kuantan Singingi	2017		

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Tahun
		49 Kab. Kepulauan Meranti	2017
		50 Kota Pekanbaru	2017
		51 Kota Dumai	2017
11	Bangka Belitung	52 Kab. Bangka	2017
		53 Kab. Belitung	2018
12	Banten	54 Kota Tangerang	2017
		55 Kota Serang	2018
		56 Kab. Serang	2018
13	Jawa Tengah	57 Kab. Cilacap	2017
		58 Kab. Sukoharjo	2017
		59 Kab. Demak	2018
		60 Kota. Solo	2018
		61 Kota Semarang	2018
14	Bali	62 Kab. Buleleng	2017
15	NTB	63 Kab. Bima	2017
		64 Kab. Sumbawa Barat	2017
		65 Kota Bima	2017
		66 Kota Mataram	2018
		67 Kab. Lombok Utara	2018
16	Kalimantan Selatan	68 Kab. Banjar	2017
		69 Kab. Tapin	2018

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Tahun
		70 Kota Banjarmasin	2018
		71 Kab. Tanah Laut	2018
		72 Kab. Kotabaru	2018
17	Kalimantan Timur	73 Kab. Paser	2017
		74 Kab. Kutai Timur	2017
		75 Kab. Berau	2018
18	Sulawesi Utara	76 Kab. Minahasa	2017
		77 Kota Manado	2018
		78 Kab. Minahasa Tenggara	2018
19	Sulawesi Tenggara	79 Kab. Buton	2017
		80 Kota Kendari	2018
20	Gorontalo	81 Kab. Gorontalo	2018
21	Kalimantan Tengah	82 Kota Palangkaraya	2018
22	Maluku utara	83 Kota Ternate	2018
23	Sulawesi Barat	84 Kab. Mamuju	2018
24	Sulawesi Tengah	85 Kota Palu	2018
		86 Kab. Buol	2017
25	Sumatera Selatan	87 OKU Selatan	2018
		88 Musi Rawas Utara	2018
		89 Kota Palembang	2018
26	Papua	90 Kab. Fak Fak	2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2017	TAHUN 2018		
			TARGET	REALISASI	%
Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota	7. Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan rintisan wajib PAUD	55 Kab/Kota	100 kab/kota	90 kab/kota	90%

8. Jumlah dokumen penyelenggaraan HAN, Lomba dan Apresiasi

Indikator Kinerja Kegiatan didukung oleh kegiatan Lembaga Mitra Memeroleh Bantuan Kerjasama Kelembagaan PAUD dengan target sebanyak 34 lembaga dan terealisasi 34 lembaga. Tujuan dari bantuan ini adalah meningkatkan akses dan mutu PAUD dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas layanan PAUD yang berkualitas, meningkatkan dukungan dan partisipasi lembaga/organisasi mitra dalam peningkatan layanan PAUD berkualitas, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan PAUD berkualitas.

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Jumlah dokumen penyelenggaraan

HAN, Lomba dan Apresiasi adalah pelaksanaan Dialog Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Keluarga Tahun 2018, dengan mengusung tema "Mewujudkan PAUD Berkualitas, Inklusif dan Berkesetaraan". Kegiatan ini diselenggarakan di Bandung pada tanggal 6 – 8 Desember 2018, dengan mengadakan 7 workshop secara bersamaan dan jumlah peserta yang hadir mencapai 500 orang dan dihadiri oleh Kemendikbud. Pada acara tersebut juga di laksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini.



Kegiatan Dialog kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Keluarga Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2017	TAHUN 2018		
			TARGET	REALISASI	%
Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota	8. Jumlah dokumen penyelenggaraan HAN, Lomba dan Apresiasi	19 dokumen	34 Dokumen	34 dokumen	100%

9. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD

Tahun 2018 IKK ini didukung oleh output PKG PAUD memperoleh bantuan gugus PAUD dengan target 2.100 lembaga dan terealisasi 2.100 lembaga (100%), dengan sebaran di 34 Provinsi dengan sebaran seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5
Sebaran Bantuan PKG PAUD

No.	Propinsi	Jumlah Lembaga	Satuan Biaya
1	Aceh	48	10.000.000
2	Babel	14	10.000.000
3	Bali	21	10.000.000
4	Banten	48	10.000.000
5	Bengkulu	38	10.000.000
6	D.I. Yogyakarta	34	10.000.000
7	DKI Jakarta	17	10.000.000
8	Gorontalo	19	10.000.000
9	Jambi	55	10.000.000
10	Jawa Barat	209	10.000.000
11	Jawa Tengah	291	10.000.000
12	Jawa Timur	331	10.000.000
13	Kalimantan Barat	49	10.000.000
14	Kalimantan Selatan	64	10.000.000
15	Kalimantan Tengah	41	10.000.000
16	Kalimantan Timur	29	10.000.000
17	Kalimantan Utara	11	10.000.000
18	Kepulauan Riau	7	10.000.000

No.	Propinsi	Jumlah Lembaga	Satuan Biaya
19	Lampung	58	10.000.000
20	Maluku	19	10.000.000
21	Maluku Utara	24	10.000.000
22	Nusa Tenggara Barat	54	10.000.000
23	Nusa Tenggara Timur	39	10.000.000
24	Papua	8	10.000.000
25	Papua Barat	11	10.000.000
26	Riau	26	10.000.000
27	Sulawesi Barat	25	10.000.000
28	Sulawesi Selatan	126	10.000.000
29	Sulawesi Tengah	30	10.000.000
30	Sulawesi Tenggara	65	10.000.000
31	Sulawesi Utara	37	10.000.000
32	Sumatera Barat	54	10.000.000
33	Sumatera Selatan	31	10.000.000
34	Sumatera Utara	167	10.000.000
JUMLAH		2100	340.000.000

Tujuan dari bantuan ini adalah membantu lembaga PKG PAUD dalam meningkatkan peran, fungsi dan tugasnya sebagai koordinator antar gugus di tingkat kecamatan, sebagai wadah pembinaan seluruh anggota gugus, dan sebagai bengkel kerja peningkatan mutu layanan PAUD dan Memberikan dukungan dan motivasi kepada lembaga PKG PAUD dalam membina gugus PAUD dan lembaga PAUD di wilayah kerjanya. Selain dari pada itu diharapkan dapat meningkatkan layanan PKG sebagai pusat informasi terkait dengan kebijakan baru, pengetahuan kepada anggota PKG PAUD, memberikan pelayanan, keterampilan yang terbaik buat seluruh anggota PKG PAUD, peningkatan kualitas mutu Guru dan Tenaga Kependidikan



Kegiatan Pendampingan Lembaga PKG PAUD

serta hal-hal lain yang terkait layanan PAUD Kendala dari pelaksanaan pemberian bantuan ini adalah masih terdapat daerah-daerah yang belum mengaktifkan dan memanfaatkan gugus-gugus PAUD dikarenakan minimnya pembinaan dari dinas setempat dan masih rendahnya kesadaran lembaga PKG PAUD dalam membuat laporan penerimaan bantuan PKG PAUD tahun 2018, adanya rekening lembaga PKG PAUD yang tidak aktif, serta lampiran fotokopi rekening bank lembaga yang nomornya tidak jelas (sehingga pencarian dana retur dari KPPN).

Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2018 memberikan bantuan untuk lembaga PKG PAUD sebanyak untuk 2100 lembaga PKG PAUD dengan anggaran sebesar Rp21.587.390.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), sementara anggaran bantuan PKG ditahun 2017 sebesar Rp2.000.000.000,- atau sebanyak untuk 2000 lembaga PKG PAUD, maka selisih anggaran bantuan PKG PAUD di tahun 2017 sebesar Rp19.587.390.000,- (Sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2017	TAHUN 2018		
			TARGET	REALISASI	%
Terciptanya keluasannya dan pemerataan akses PAUD Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota	9. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD	2.000 Lembaga	2.100 Lembaga	2.100 lembaga	100%

10. Jumlah dokumen Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD

Untuk mendukung PAUD berkualitas, tahun 2018 Direktorat pembinaan PAUD membuat bahan-bahan kebijakan. Indikator Kinerja Kegiatan yang dibuat berupa dokumen NSPK PAUD dengan target 29 jenis dokumen. Hasil dokumen yang telah terealisasi adalah 29 jenis dokumen, target yang dicapai sebesar 100%.

Tabel 6
Rekap Judul NSPK Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2018

Sub Direktorat	Judul NSPK
Program dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Koordinasi Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar pada Tahun 2018 Petunjuk Teknis Bantuan Program Pengembangan Ilmuwan Cilik Tahun 2018 Petunjuk Teknis Bantuan Inisiasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 0 – 3 Tahun pada Tahun 2018 Petunjuk Teknis Bantuan Pemberian Makanan Sehat Tahun 2019 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018 Program Ilmuwan Cilik
Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> Pedoman Penyelenggaraan PAUD Inklusi SOP PAUD Inklusif : Identifikasi dan Asesmen SOP PAUD Inklusif : Program Pembelajaran Individual SOP PAUD Inklusif : Pedoman Pembelajaran SOP PAUD Inklusif : Sarana dan Prasarana SOP PAUD Inklusif : Penilaian dan Laporan Perkembangan SOP PAUD Inklusif : Bimbingan dan Konseling Pedoman Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Pedoman Kesiapan Belajar Pedoman Pengisian Laporan Perkembangan Petunjuk Teknis Bantuan BOP Anak Berkebutuhan Khusus Petunjuk Teknis Bantuan PAUD Layanan Khusus Panduan Peningkatan Kapasitas Implementasi Kurikulum
Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD Petunjuk Teknis Bantuan Program Pustaka Mainan Petunjuk Teknis Bantuan Paska Bencana PAUD Petunjuk Teknis Bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru di Daerah 3T Petunjuk Teknis Bantuan PAUD Percontohan Pembangunan Unit Gedung Baru dan Revitalisasi Gedung Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Pembelajaran/ Termasuk Alat Permainan Edukatif Pedoman Sarana PAUD Panduan Sarana Dalam Ruang Panduan Sarana Luar Ruang Panduan Pengesahan Kekerasan terhadap Anak Usia Dini Panduan Alat Permainan Edukatif (APE) Berbahan Lokal Panduan Sarana Pengasuhan Anak Usia 0 – 3 Tahun Bangunan Gedung PAUD Panduan Penataan Dapur

Sub direktorat	Judul NSPK
	16. Panduan Penataan Ruang Pemeriksaan Kesehatan 17. Penataan Kamar Mandi, Jamban, dan Fasilitas Cuci Tangan di Satuan PAUD 18. Bahan Sosialisasi Pengembangan Alat Permainan Edukatif Berbahan Lokal 19. Bahan Sosialisasi Pemilihan Alat Permainan Edukatif PAUD 20. Bahan Sosialisasi Pelaksanaan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD 21. Bahan Sosialisasi Panduan Teknis Bangunan PAUD
Kelembagaan dan Kemitraan	1. Petunjuk Teknis Bantuan Pusat Kegiatan Gugus (PKG) 2. Petunjuk Teknis Bantuan KKP 3. Petunjuk Teknis Bantuan TUK 4. Seri Booklet Bahan Sosialisasi PAUD Berkualitas 5. Pedoman Penanaman Karakter Anak Usia Dini 6. Panduan Umum Dialog kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Keluarga Tahun 2018 : "Mewujudkan PAUD Berkualitas, Inklusif, dan Kesetaraan"

Pada tahun 2018 setelah revisi terdapat penambahan yang cukup signifikan dari kegiatan kerjasama UNICEF dan Direktorat Pembinaan PAUD sebesar Rp9.680.057.000. Kegiatan yang dilaksanakan oleh program kerjasama ini adalah Pelaksanan PAUD HI Berintegritas di Kabupaten Kupang dengan penadampingan dan pemberian bantuan kepada 100 lembaga di Kab. Kupang. Program ini telah berjalan selama 3 tahun dengan dana yang diperoleh dari pemerintahan New Zealand melalui UNICEF.



Bantuan Sanitasi di Kabupaten Bogor

Program lainnya yang bekerja sama dengan UNICEF adalah pilot/pemodelan PAUD Pra-SD Universal Berkualitas di Kabupaten Bogor. Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana dari Yayasan IKEA untuk periode pelaksanaan 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2020.

Pelaksanaan program pilot/pemodelan PAUD Pra – SD Universal berkualitas di Kabupaten Bogor dengan pendampingan ke 100 lembaga PAUD di 20 kecamatan. Pemberian bantuan yang telah dilaksanakan adalah bantuan untuk perbaikan sanitasi, perbaikan atap, APE luar maupun APE dalam. Begitu pula halnya dengan 100 lembaga di Kabupaten Kupang telah memberikan bantuan ke 100 lembaga dengan jenis bantuan yang sama di Kabupaten Bogor. Selain itu pada program ini telah di susun 10 Panduan bagi guru untuk kedua program ini.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2017	TAHUN 2018		
			TARGET	REALISASI	%
Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota	10. Jumlah dokumen NSPK PAUD	37 dokumen	29 dokumen	50 dokumen	172%

B. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Tahun 2018 untuk sasaran strategis "Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota" sebesar Rp217.471.844.000,- (dua ratus tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang tersebar ke 10 indikator kinerja kegiatan.

Capaian realisasinya Direktorat Pembinaan PAUD pada tahun 2018 sebesar **Rp209.514.606.158,- (dua ratus Sembilan miliar lima ratus empat belas juta enam ratus enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah)**mencapai persentase sebesar **96,34 %**.Capaian fisik sampai akhir tahun 100%.

Anggaran Kegiatan Penyediaan Layanan PAUD pada tahun 2018 tersebar di empat subdit, dan Subbag Tata Usaha. Implementasi program PAUD pada tahun 2018 mampu menyerap alokasi dana yang disediakan sebesar 96,34%.

$$\frac{\text{Rp } 209.514.606.158,-}{\text{Rp } 217.471.844.000,-} \times 100\% = 96,34\%$$

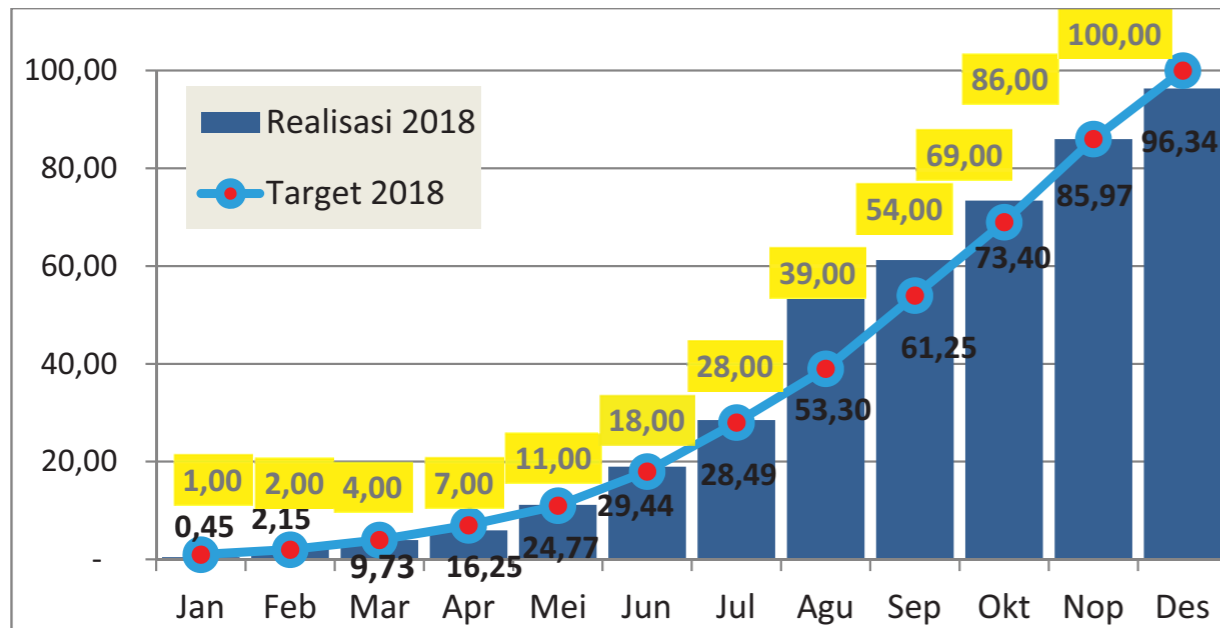
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan dengan perjanjian kinerja terakhir,realisasi anggaran dari 10 indikataor kinerja adalah sebagai berikut:

1. Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina yang dibangun/revitalisasi didaerah 3T dengan target 215 lembaga dan anggaran Rp55.571.982.000,- terealisasi Rp54.518.625.120,- atau 98,10%
2. Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE dengan target 90 lembaga dan anggaran Rp6.981.440.000,- terealisasi Rp6.593.553.860 atau 94,44%
3. Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun

4. Jumlah anak memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3 – 6 tahun dengan target 5.500 anak dan anggaran Rp11.294.560.000,- terealisasi Rp11.251.531.390,- atau 99,62%
5. Persentase lembaga PAUD pembina menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif dengan target 660 lembaga dan anggaran Rp11.089.655.000,- terealisasi Rp10.963.534.398,- atau 98,86%
6. Jumlah lembaga yang melaksanakan kurikulum 2013 PAUD dengan target 5.869 lembaga dan anggaran Rp30.291.846.000,- terealisasi Rp29.518.842.556,- atau 97,45%
7. Kabupaten/kota yang menyelenggarakan penuntasan PAUD minimal 1 tahun pra-SD dengan target 40 kab./kota dan anggaran Rp7.651.236.000,- terealisasi Rp7.614.019.050,- atau 99,51%
8. Jumlah dokumen penyelenggaraan HAN, lomba, dan apresiasi dengan target 34 lembaga dan anggaran Rp7.136.400.000,- terealisasi Rp6.859.928.150,- atau 96,13%
9. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) memperoleh bantuan gugus PAUD dengan target 6.100 lembaga dan anggaran Rp26.171.615.000,- terealisasi Rp25.075.703.160,- atau 95,81%
10. Jumlah dokumen NSPK PAUD dengan target 29 dokumen dan anggaran Rp28.515.944.000,- terealisasi Rp26.881.585.882,- atau 94,27%

Hal di atas menunjukkan bahwa kinerja daya serap keuangan sudah cukup bagus dikarenakan dengan berbagai kendala dan pemotongan anggaran masih dalam kisaran angka yang mendekati target 100%. Hal ini tidak terlepas dari kinerja setiap subdit di Direktorat Pembinaan PAUD yang sangat baik. Gambaran capaian daya serap Direktorat Pembinaan PAUD selama tahun 2018 terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 5
Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2018



Khusus untuk dana di pusat, kondisi realisasi anggaran Direktorat Pembinaan PAUD per subdit sampai dengan akhir tahun 2018 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7
Kondisi Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan PAUD per-Subdit

NO	SUBDIT	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PROGEV	36.667.705.000	36.505.254.450	99,56
2	KURIKULUM	23.640.801.000	22.923.030.504	96,96
3	SARPRAS	83.814.152.000	81.308625.750	97,01
4	BAG MITRA	53.048.330.000	51.189.870.012	96,50
5	TATA USAHA	20.300.856.000	17.587.510.442	86,63
Total		217.471.844.000	209.514.291.158	96,34

BAB IV Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan PAUD akhir tahun 2018 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pertengahan tahun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Direktorat Pembinaan PAUD kepada semua elemen masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional.

Segala upaya yang telah dilakukan, pelaksanaan program di lingkungan Direktorat PAUD sampai akhir tahun 2018 mencapai daya serap anggaran **96,34%**. Pencapaian dan realisasi anggaran dan

program tersebut cukup memuaskan karena untuk Ditjen PAUD dan Dikmas daya serap Direktorat Pembinaan PAUD ada di urutan ketiga dan hampir semua program utama dan nasional telah terselenggara dengan cukup baik.

Dengan disusunnya laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2018, selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk pencapaian target kinerja dan dari hasil penilaian ini dapat meningkatkan kinerja Direktorat Pembinaan PAUD selama tahun 2018 ini.





Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Dengan
Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

TUGAS

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan tanggung jawab, saya akan:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini;
2. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini;
4. Memfasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan anak usia dini;
5. Memberi pertimbangan dalam pemberian izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini;
6. Memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini;
7. Melakukan Koordinasi dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini;
8. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan anak usia dini;
9. Memantau pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan anak usia dini; dan
10. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan administrasi Direktorat.

TARGET CAPAIAN

PROGRAM: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
 KEGIATAN: PENYEDIAAN LAYANAN PAUD

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
Meningkatnya anak usia 3-6 tahun memperoleh layanan pendidikan anak usia dini yang berstandar nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina yang dibangun/revitalisasi	130 Lembaga	54.238.693.000
	1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Gedung	130 Lembaga	54.238.693.000
	Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE	60 Lembaga	6.002.453.000
	1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Sarana Pembelajaran termasuk Alat Permainan Edukatif (APE)	40 Lembaga	3.028.153.000
	2. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	20 lembaga	2.974.300.000
	Jumlah lembaga PAUD terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T	55 Lembaga	36.606.114.000
	1. Lembaga PAUD Pembina dan di Daerah 3T Memperoleh Bantuan Pembangunan Gedung Baru	55 Lembaga	36.606.114.000
	Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir	40 Lembaga	5.009.310.000
	1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD	40 Lembaga	5.009.310.000
	Lembaga PAUD memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3-6 Tahun	9.500 anak	14.754.560.000
1. Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan	6.500 anak	11.754.560.000	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
	2. Lembaga PAUD Pembina Menyelenggarakan Holistik Integratif	3.000 anak/200 lembaga	3.000.000.000
	Kabupaten/kota yang melaksanakan kurikulum 2013 PAUD	6.389 lembaga	45.956.120.000
	1. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	5.869 lembaga	38.471.080.000
	2. Lembaga PAUD Pembina Menyelenggarakan Holistik Integratif	460 lembaga	7.485.040.000
	Kabupaten/kota yang menyelenggarakan rintisan wajib PAUD	40 Kab/Kota	9.379.000.000
	1. Kabupaten/kota Menuntaskan PAUD Minimal 1 Tahun Pra-SD	40 Kab/Kota	9.379.000.000
	Jumlah dokumen penyelenggaraan HAN, Lomba dan Apresiasi	34 Lembaga	7.591.950.000
	1. Lembaga Mitra Memperoleh Bantuan Kerjasama Kelembagaan PAUD	34 Lembaga	2.680.000.000
	2. Lembaga/Mitra PAUD Memperoleh Peningkatan Kapasitas	2 Keg	4.911.950.000
	Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD	6.100 Lembaga	28.310.380.000
	1. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Memperoleh Bantuan Gugus PAUD	2.100 Lembaga	21.950.000.000
	2. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	4.000 lembaga	6.360.380.000
	Jumlah dokumen NSPK PAUD	29 Dok	13.599.020.000
	1. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD	29 Dok	13.599.020.000
	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	2 Dok	3.960.400.000
	1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1	2 Dok	3.960.400.000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
	Jumlah dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	4 Dok	2.333.000.000
	1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1	4 Dok	2.333.000.000

Jumlah anggaran program Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat untuk kegiatan Penyediaan Layanan PAUD sebesar **Rp. 245.708.856.000,-** (Dua Ratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018 Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini



NO	RENCANA PENYERAPAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Bulanan	2,777	5,528	9,165	13,809	14,325	16,315	26,979	26,242	28,576	28,748	32,507	40,739
2	Kumulatif	2,777	8,305	17,470	31,279	45,604	61,919	88,898	115,140	143,716	172,464	204,971	245,710
3	%	1.13%	3.38%	7.11%	12.73%	18.56%	25.20%	36.18%	46.86%	58.49%	70.19%	83.42%	100%

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal PAUD
dan Pendidikan Masyarakat,

Harris Iskandar

Jakarta, Januari 2018
Direktur Pembinaan PAUD,

R. Ella Yulaelawati R



Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Dengan
Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

TUGAS

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan tanggung jawab, saya akan:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini;
2. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini;
4. Memfasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan anak usia dini;
5. Memberi pertimbangan dalam pemberian izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini;
6. Memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini;
7. Melakukan Koordinasi dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini;
8. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan anak usia dini;
9. Memantau pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan anak usia dini; dan
10. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan administrasi Direktorat.

TARGET CAPAIAN

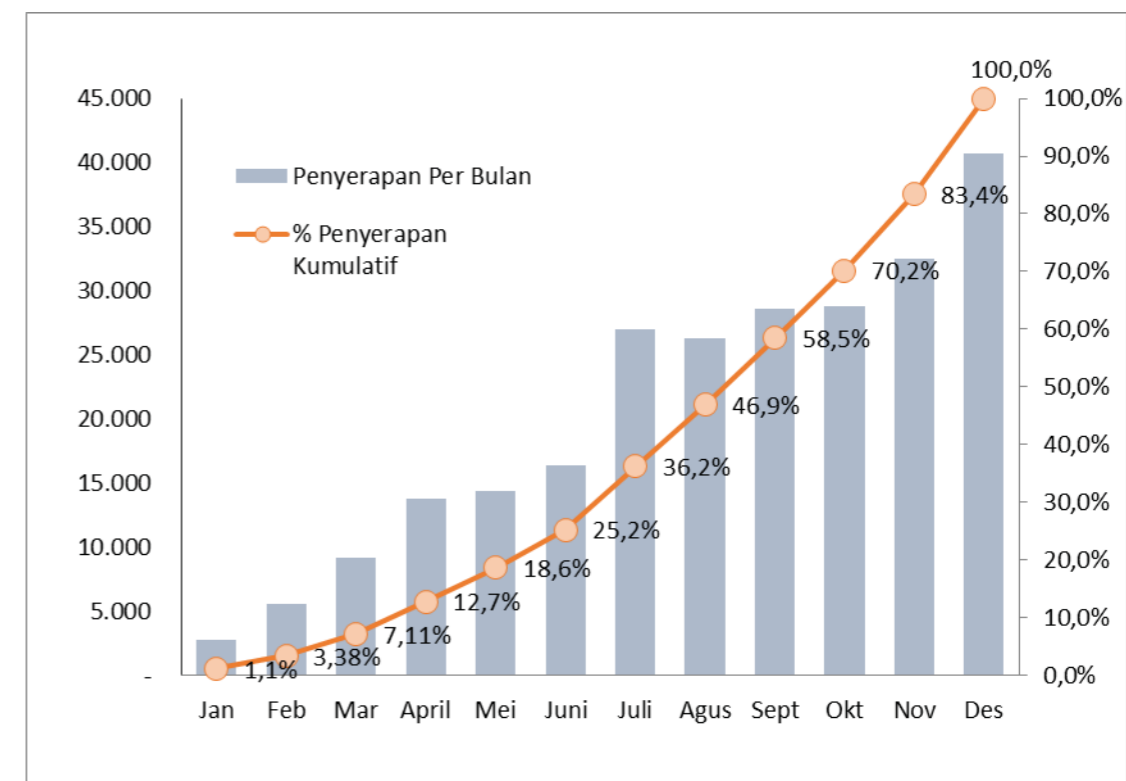
PROGRAM: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
 KEGIATAN: PENYEDIAAN LAYANAN PAUD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018	
		TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya anak usia 3-6 tahun memperoleh layanan pendidikan anak usia dini yang berstandar nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	Jumlah lembaga PAUD terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T	215 lembaga	56.575.982.000
	1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Gedung	160 lembaga	27.441.024.000
	2. Lembaga PAUD Pembina dan di Daerah 3T Memperoleh Bantuan Pembangunan Gedung Baru	55 lembaga	29.134.958.000
	Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE	70 lembaga	6.981.440.000
	1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Sarana Pembelajaran termasuk Alat Permainan Edukatif (APE)	60 lembaga	3.028.153.000
	2. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	10 lembaga	3.953.287.000
	Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir	120 lembaga	13.809.310.000
	1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD	120 lembaga	13.809.310.000
	Jumlah anak memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3-6 Tahun	5.500 anak	11.294.560.000
	1. Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan	5.500 anak	11.294.560.000
	Persentase Lembaga PAUD pembina menyelenggarakan PAUD holistik integrative	660 lembaga	11.089.655.000
	1. Lembaga PAUD Pembina Menyelenggarakan Holistik Integratif	660 lembaga	10.629.655.000
	2. Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan	1 Keg	460.000.000
	Jumlah lembaga yang melaksanakan kurikulum 2013 PAUD	5.869 lembaga	30.390.871.000
1. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	5.869 lembaga	30.390.871.000	
Kabupaten/kota yang menyelenggarakan penuntasan PAUD minimal 1 Tahun pra SD	40 Kab/Kota	7.651.236.000	
1. Kabupaten/kota Menuntaskan PAUD Minimal 1 Tahun Pra-SD	40 Kab/Kota	7.651.236.000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018	
		TARGET	ANGGARAN
	Jumlah dokumen penyelenggaraan HAN, Lomba dan Apresiasi	34 lembaga	6.710.300.000
	1. Lembaga Mitra Memperoleh Bantuan Kerjasama Kelembagaan PAUD	34 lembaga	2.646.125.000
	2. Lembaga/Mitra PAUD Memperoleh Peningkatan Kapasitas	2 Keg	4.064.175.000
	Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD	6.100 lembaga	27.633.390.000
	1. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Memperoleh Bantuan Gugus PAUD	2.100 lembaga	22.013.490.000
	2. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	4.000 lembaga	5.619.900.000
	Jumlah dokumen NSPK PAUD	29 Dok	19.192.187.000
	1. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD	29 Dok	13.333.790.000
	2. Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1	1 Layanan	5.858.397.000

Jumlah anggaran program Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat untuk kegiatan Penyediaan Layanan PAUD sebesar **Rp. 209.296.787.000,-**

Rencana Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2018



NO	Rencana Penyerapan	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	TOTAL
1	Penyerapan Bulanan	2.365	4.709	7.807	11.762	12.202	13.897	22.981	22.353	24.341	24.488	27.690	34.701	209.297
2	Penyerapan Kumulatif	2.365	7.074	14.881	26.643	38.845	52.743	75.724	98.076	122.418	146.905	174.595	209.297	
3	% Penyerapan Kumulatif	1,1%	3,38%	7,11%	12,7%	18,6%	25,2%	36,2%	46,9%	58,5%	70,2%	83,4%	100,0%	

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 1 Oktober 2018

Direktur Jenderal PAUD
dan Pendidikan Masyarakat

Harris Iskandar
Harris Iskandar

Direktur Pembinaan PAUD

Muhammad Hasbi
Muhammad Hasbi

Pengukuran Kinerja Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018		TAHUN 2018 REALISASI			
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	%	ANGGARAN	%
Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota	Jumlah lembaga PAUD terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T	215 Lembaga	55.571.982.000	215 Lembaga	100	54.518.625.120	98,10
	1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Gedung	160 Lembaga	26.437.024.000	160 Lembaga	100	26.261.106.640	99,33
	2. Lembaga PAUD Pembina dan di Daerah 3T Memperoleh Bantuan Pembangunan Gedung Baru	55 Lembaga	29.134.958.000	55 Lembaga	100	28.257.518.480	96,99
	Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE	90 Lembaga	6.981.440.000	90 Lembaga	100	6.593.553.860	94,44
	1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Sarana Pembelajaran termasuk Alat Permainan Edukatif (APE)	80 Lembaga	3.028.153.000	80 Lembaga	100	2.829.283.860	93,43
	2. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	10 lembaga	3.953.287.000	10 lembaga	100	3.764.270.000	95,22
	Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir	128 Lembaga	14.799.310.000	128 Lembaga	100	14.660.275.000	99,06
	1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD	128 Lembaga	14.799.310.000	128 Lembaga	100	14.660.275.000	99,06
	Jumlah anak memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3-6 Tahun	5.500 anak	11.294.560.000	5.500 anak	100	11.251.531.390	99,62
	1. Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan	5.500 anak	11.294.560.000	5.500 anak	100	11.251.531.390	99,62
	Persentase Lembaga PAUD pembina menyelenggarakan PAUD holistik integratif	660 Lembaga	11.089.655.000	660 Lembaga	100	10.963.534.398	98,86
	1. Lembaga PAUD Pembina Menyelenggarakan Holistik Integratif	660 Lembaga	10.629.655.000	660 Lembaga	100	10.629.655.000	100,00
	2. Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan	1 Keg	460.000.000	1 Keg	100	333.879.398	72,58
	Jumlah lembaga yang melaksanakan kurikulum 2013 PAUD	5.869 lembaga	30.291.846.000	5.869 lembaga	100	29.518.842.556	97,45
	1. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	5.869 lembaga	30.291.846.000	5.869 lembaga	100	29.518.842.556	97,45
	Kabupaten/kota yang menyelenggarakan penuntasan PAUD minimal 1 Tahun pra SD	40 Kab/Kota	7.651.236.000	40 Kab/Kota	100	7.614.019.050	99,51
	1. Kabupaten/kota Menuntaskan PAUD Minimal 1 Tahun Pra-SD	40 Kab/Kota	7.651.236.000	40 Kab/Kota	100	7.614.019.050	99,51
	Jumlah dokumen penyelenggaraan HAN, Lomba dan Apresiasi	34 Lembaga	7.136.400.000	34 Lembaga	100	6.859.928.150	96,13
	1. Lembaga Mitra Memperoleh Bantuan Kerjasama Kelembagaan PAUD	34 Lembaga	2.646.125.000	34 Lembaga	100	2.582.719.100	97,60
	2. Lembaga/Mitra PAUD Memperoleh Peningkatan Kapasitas	2 Keg	4.490.275.000	2 Keg	100	4.277.209.050	95,25
	Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD	6.100 Lembaga	26.171.615.000	6.100 Lembaga	100	25.075.703.160	95,81
	1. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Memperoleh Bantuan Gugus PAUD	2.100 Lembaga	21.587.390.000	2.100 Lembaga	100	21.508.025.000	99,63
	2. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	4.000 lembaga	4.584.225.000	4.000 lembaga	100	3.567.678.160	77,83
	Jumlah dokumen NSPK PAUD	29 Dok	28.515.944.000	29 Dok	100	26.881.585.882	94,27
	1. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD	29 Dok	13.012.790.000	29 Dok	100	11.776.766.032	90,50
	2. Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1	1 Layanan	15.503.154.000	1 Layanan	100	15.104.819.850	97,43


 RENCANA KINERJA TAHUNAN
 TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

 Instansi/Unit Kerja : Direktorat Pembinaan PAUD
 Tahun : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018	
		TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya anak usia 3-6 tahun memperoleh layanan pendidikan anak usia dini yang berstandar nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	Jumlah lembaga PAUD terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T	215 lembaga	56.575.982.000
	1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Gedung	160 lembaga	27.441.024.000
	2. Lembaga PAUD Pembina dan di Daerah 3T Memperoleh Bantuan Pembangunan Gedung Baru	55 lembaga	29.134.958.000
	Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE	70 lembaga	6.981.440.000
	1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Sarana Pembelajaran termasuk Alat Permainan Edukatif (APE)	60 lembaga	3.028.153.000
	2. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	10 lembaga	3.953.287.000
	Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir	120 lembaga	13.809.310.000
	1. Lembaga PAUD Memperoleh Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD	120 lembaga	13.809.310.000
	Jumlah anak memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3-6 Tahun	5.500 anak	11.294.560.000
	1. Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan	5.500 anak	11.294.560.000
	Persentase Lembaga PAUD pembina menyelenggarakan PAUD holistik integrative	660 lembaga	11.089.655.000
	1. Lembaga PAUD Pembina Menyelenggarakan Holistik Integratif	660 lembaga	10.629.655.000
	2. Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan	1 Keg	460.000.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018	
		TARGET	ANGGARAN
	Jumlah lembaga yang melaksanakan kurikulum 2013 PAUD	5.869 lembaga	30.390.871.000
	1. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	5.869 lembaga	30.390.871.000
	Kabupaten/kota yang menyelenggarakan penuntasan PAUD minimal 1 Tahun pra SD	40 Kab/Kota	7.651.236.000
	1. Kabupaten/kota Menuntaskan PAUD Minimal 1 Tahun Pra-SD	40 Kab/Kota	7.651.236.000
	Jumlah dokumen penyelenggaraan HAN, Lomba dan Apresiasi	34 lembaga	6.710.300.000
	1. Lembaga Mitra Memperoleh Bantuan Kerjasama Kelembagaan PAUD	34 lembaga	2.646.125.000
	2. Lembaga/Mitra PAUD Memperoleh Peningkatan Kapasitas	2 Keg	4.064.175.000
	Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD	6.100 lembaga	27.633.390.000
	1. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Memperoleh Bantuan Gugus PAUD	2.100 lembaga	22.013.490.000
	2. Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	4.000 lembaga	5.619.900.000
	Jumlah dokumen NSPK PAUD	29 Dok	19.192.187.000
	1. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD	29 Dok	13.333.790.000
	2. Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1	1 Layanan	5.858.397.000